

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Kabupaten Solok disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupaten Solok merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Diskominfo Kabupaten Solok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Diskominfo yang menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera", serta diperkuat dengan Misi ke-1 "Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani". Strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun *outcome* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2025 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Kabupaten Solok, Februari 2026

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok


SUSI SOFIANTI WIDANI, SH, MM
NIP. 197203191993032004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas, Fungsi Perangkat Daerah.....	4
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
2.4 perencanaan anggaran tahun 2025	
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Rencana strategis 2025-2029	23
3.2 Rencana strategis 2021-2026.....	40
BAB IV PENUTUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Tabel 1.2	Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 1.3	Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 1.4	Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2025.....	8
Tabel 1.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2025.....	9
Tabel 1.6	Anggaran Belanja Diskominfo Kab. Solok TA 2025.....	10
Tabel 1.7	Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	15
Tabel 2.2	Tekni Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika	16
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029 Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	18
Tabel 2.4	.Indikator Kinerja Utama Renstra 2021-2026 .Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	19
Tabel 2.5	.Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	20
Tabel 2.6.	Perencanaan Anggaran Tahun 2025 Sesuai Renstra 2025- 2029 Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	21
Tabel 2.7	.Perencanaan Anggaran Tahun 2025 Sesuai Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	22
Tabel 3.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	23
Tabel 3.2.	Perkembangan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	24
Tabel 3.3.	Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI).....	24
Tabel 3.4.	Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber daya	25

Tabel. 3.5.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	26
Tabel 3.6.Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah.....	28
Tabel 3.7.Indeks Pembangunan Statistik (IPS).....	29
Tabel 3.8.Perkembangan Indek Pembangunan Statistik (IPS).....	29
Tabel 3.9.Perbandingan Indek Pembangunan Statistik (IPS).....	30
Tabel. 3.10.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	30
Tabel. 3.11.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	31
Tabel 3.12.Indeks SPBE (terkait keamanan).....	32
Tabel 3.13.Indeks SPBE (terkait keamanan).....	32
Tabel 3.14.Indeks SPBE (terkait keamanan).....	33
Tabel. 3.15.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	33
Tabel. 3.16.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	35
Tabel 3.17.Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	36
Tabel 3.18.Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	36
Tabel 3.19.Perkembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	37
Tabel 3.20.Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.....	37
Tabel. 3.21.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	38
Tabel. 3.22.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	39
Tabel 3.23.Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik.....	42
Tabel 3.24.Perkembangan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah.....	42
Tabel 3.25.Perbandingan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah.....	43
Tabel 3.26 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber daya	43
Tabel. 3.27 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	46
Tabel 3.28.Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	47
Tabel 3.29.Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	48

Tabel 3.30.Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	48
Tabel. 3.31.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	49
Tabel. 3.32.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	50
Tabel. 3.33.Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga).....	52
Tabel 3.34.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	53
Tabel 3.35.Perkembangan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	54
Tabel 3.36.Perbandingan Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	54
Tabel. 3.37.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	56
Tabel. 3.38.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	58
Tabel 3.39.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.....	59
Tabel 3.40.Perkembangan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.....	59
Tabel 3.41.Perbandingan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.....	60
Tabel. 3.42.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	61
Tabel. 3.43.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	62
Tabel 3. 44.Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.....	63
Tabel 3.45.Perkembangan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.....	63
Tabel 3.46.Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok.....	64
Tabel. 3.47.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	64

Tabel. 3.48.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	65
Tabel 3.49.Indeks Keamanan Informasi (KAMI).....	66
Tabel 3.50.Perkembangan Indek Keamanan Informasi (KAMI).....	67
Tabel 3.51.Perbandingan Indek Keamanan Informasi (KAMI).....	67
Tabel. 3.52.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	68
Tabel. 3.53.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	69
Tabel 3.54.Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	70
Tabel 3.55.Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	70
Tabel 3.56.Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	71
Tabel 3.57.Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	71
Tabel. 3.58.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	72
Tabel. 3.59.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	73
Tabel 3.60.10 unsur sebagai dasar pengukuran survey terhadap pelayanan publik.....	74
Tabel 3.61.Nilai Kepuasan Aparatur.....	75
Tabel 3.62.Kategori Nilai Kinerja.....	75
Tabel 3.63.Perkembangan Nilai Kepuasan Aparatur.....	75
Tabel 3.64.Perbandingan Nilai Kepuasan Aparatur.....	76
Tabel. 3.65.Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....	76
Tabel. 3.66.Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	77
Tabel 3.67.Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025.....	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bahwa tuntutan terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan ciri-ciri pemerintah yang akuntabel, transparan dan partisipatif menjadi isu nasional yang harus disikapi oleh pelaksana kebijakan publik. Indikator yang mencerminkan tuntutan tersebut antara lain dapat dilihat dengan semakin beraninya masyarakat dalam memberikan tanggapan dan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tidak sesuai dengan aturan.

Secara umum terdapat 3 (tiga) pilar utama yang terkandung dalam suatu pemerintahan yang bercirikan *Good Governance* yaitu :

1. Adanya sistem akuntabilitas pada pemerintah yang memadai
2. Adanya sikap transparan dari pemerintah dan stakeholdernya
3. Berkembangnya partisipasi seluruh stakeholder untuk bekerjasama dan berkoordinasi.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

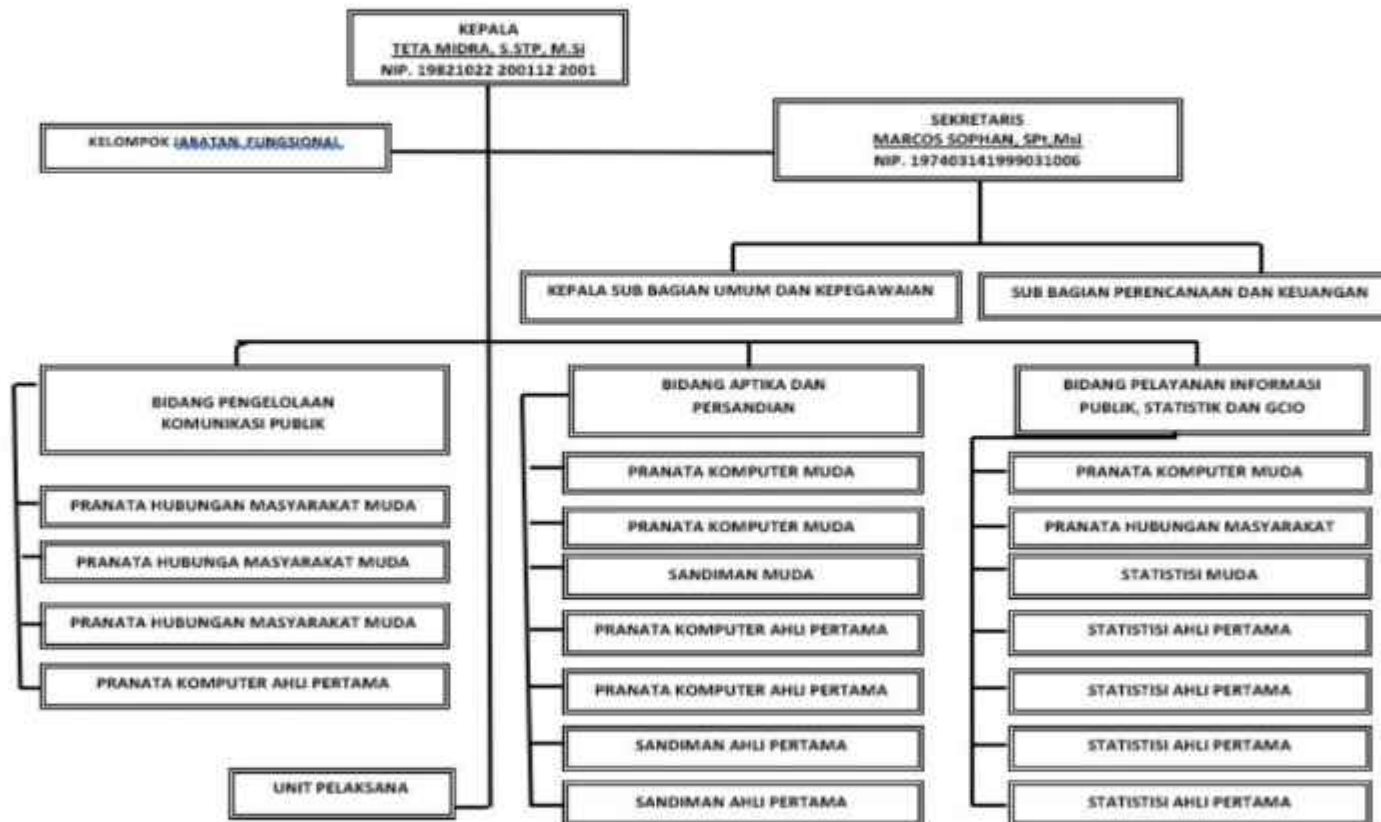
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan agar setiap instansi Pemerintah di Kabupaten Solok, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai unsur Perangkat Daerah Kabupaten Solok memberikan laporan tentang informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Solok selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu sarana evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai bahan/masukan untuk meningkatkan kinerja instansi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan

1.2. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Aptika dan Persandian, membawahi :
 - Pranata Komputer Muda
 - Pranata Komputer Ahli Pertama
 - Sandiman Ahli Pertama
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
 - Pranata Komputer Ahli Pertama
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik, Statistik, membawahi :
 - Pranata Komputer Muda
 - Statistisi Ahli Muda
 - Statistisi Ahli Pertama

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. Pembuatan laporan bulanan, triwulan, dan laporan akhir tahun,
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

c) Bidang Aptika dan Persandian

Bidang Aptika dan Persandian memiliki fungsi:

1. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
2. Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah;
3. Layanan Keamanan Informasi *e-Government*;
4. Layanan Sistem Komunikasi intra pemerintah daerah;
5. Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
6. Layanan akses internet dan intranet;
7. Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
9. Penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*;
10. Penyelenggaraan *Government Chief Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
11. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah daerah dan Masyarakat;
12. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
13. Layanan Pengelolaan Persandian; dan
14. Pengelolaan metode komunikasi sandi intra.

d) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Monitoring dan pemilihan agenda proiritas pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemda;
3. Penyediaan konten lintas sektoral;
4. Pengelolaan media komunikasi publik;
5. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
6. Pelayanan informasi publik; dan
7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.

e) Pelayanan Informasi Publik, Statistik

1. Pelayanan informasi publik;
2. Layanan Keamanan Informasi *e-Government*;
3. Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
4. Penyelenggaraan *Government Chief Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
5. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;

1.3. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

Dalam menajalankan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur TIK di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, dibutuhkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

1) Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang dengan rincian 23 (Dua Puluh Tiga) orang ASN dan 20 (Dua Puluh) orang non ASN. Jumlah Aparatur Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1.
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total	Persentase	
		Laki-laki	Perempuan		L	P
1	Kepala Dinas		1	1	0	2,04
2	Sekretariat	8	4	12	16,32	8,16
3	Aptika dan Persandian	7	3	10	14,28	6,12
4	Pengelolaan Komunikasi Publik	15	4	19	30,61	8,16
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO	4	3	7	8,16	6,12
JUMLAH		34	15	49	69,38	30,61

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2025

Aparatur Diskominfo sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Diskominfo sebanyak 49 Orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) orang atau 69,38% dan perempuan 15 (Lima Belas) orang atau 30,61%, dimana lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja di Diskominfo yang membutuhkan tenaga teknis khususnya dalam pengembangan teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet dan pembuatan konten video yang umumnya diminati oleh kaum laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga membutuhkan aparatur perempuan dalam pembuatan berita karena tingkat ketelitian yang tinggi. Sedangkan jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat	2		1	2	3
3	Aptika dan Persandian			7		7
4	Pengelolaan Komunikasi Publik			5		5
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO			5	2	7
JUMLAH		2		18	5	25

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2025

Berdasarkan golongan, aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang atau sebesar 72% dan golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang atau sebesar 20% serta PPPK Penuh waktu sebanyak 2 (Dua) Orang atau sebesar 8% dan tidak ada golongan I dan II pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Selain berdasarkan jenis kelamin dan golongan, tingkat pendidikan juga dijadikan dasar untuk penempatan aparatur Diskominfo. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh aparatur. Jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Total	Persentase
1	Pascasarjana (S2)		9	36%
		Manajemen	4	16%
		Chief Information Officer	2	8%
		Ilmu Komunikasi	2	8%
		Komputer	1	4%
2	Sarjana (S1)		15	60%
		Komputer	8	32%
		Matematika	4	16%
		Ekonomi	1	4%
		Hukum	1	4%
	Pendidikan	1	4%	
3	Diploma Tiga (D3)		1	4%
		Amd	1	4%
JUMLAH			25	100%

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2025

Aparatur Diskominfo berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 60%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Diskominfo ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Diskominfo secara umum.

Keberadaan sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana di Diskominfo dapat memperkuat keberadaan Diskominfo, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan Diskominfo berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4.
Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur laki-laki lebih mendominasi daripada aparatur perempuan	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur perempuan salah satunya dalam pengerjaan administrasi perkantoran
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tugas dan fungsi Diskominfo cukup baik	Aparatur Diskominfo golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, administrasi perkantoran dan lainnya masih kekurangan personil
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	Diskominfo membutuhkan aparatur dengan klasifikasi pendidikan komputer/sandiman untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional double garden untuk ke kecamatan yang sulit dijangkau

Sumber: Diskominfo Kab.Solok 2025

2) Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				B	RR	RB
1	Kendaraan Dinas Roda 4	4	Unit	4	-	-
2	Sepeda Motor	-	Unit	-	-	-
3	Filling Kabinet Besi	2	Unit	2	-	-
4	Mesin Ketik Manual	1	Unit	1	-	-
5	Mesin Absensi	49	Unit	49	-	-
6	CCTV	16	Unit	16	-	-
7	Personal Komputer	9	Unit	9	-	-
8	Laptop/Notebook	38	Unit	33	-	-
9	Tablet	2	Unit	2		
10	Mainframe	1	Unit	1	-	-
11	Printer	16	Unit	14	-	-
12	scanner	1	Unit	1		
13	Server	5	Unit	4	-	-
14	Router	8	Unit	9	-	-
15	Hub	1	Unit	1	-	-
16	Lemari Kayu	8	Unit	8	-	-
17	Meja	36	Unit	36	-	-
18	Kursi	65	Unit	65	-	-
19	Kursi tamu	3	set	3	-	-
20	Karpet	1	Unit	1	-	-
21	AC Window	4	Unit	3	-	-
22	Televisi	2	Unit	3	-	-
23	Peralatan Studio	14	Paket	18	-	-
24	Peralatan studio video dan film	15	Unit	15	-	-
25	Camera Film	4	Unit	7	-	-
26	Lambang Instansi	1	Unit	1	-	-
27	Alat Komunikasi Radio	14	Unit	7	-	-
28	Faximile	1	Unit	1	-	-
29	Pemancar Radio	5	Unit	2	-	-
30	Genset	1	Unit	2	-	-
31	Screen Pembatas	3	Unit	3	-	-
32	Uninterrupted Power Supply	1	Unit	1	-	-
33	Tool Kit Set	5	Paket	5	-	-
34	Mesin Pemetong Rumput	1	Unit	1	-	-
35	Lemari Es	1	Unit	1	-	-
36	Rak Piring	1	Unit	1	-	-
37	Tangga	1	Unit	1	-	-
38	Layar Projector	1	Unit	1	-	-
39	Stabilizer	1	Unit	1	-	-
40	PerangkatWifi	2	Unit	2	-	-
JUMLAH		316		316		

Sumber : Rekapitulasi Aset Diskominfo Tahun 2025

3) Keuangan

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagian besar berasal dari APBD Daerah Kabupaten Solok. Rincian anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Anggaran Belanja Diskominfo Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2025

No	SUMBER DANA	BESARAN ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	APBD	Rp. 9.713.882.308,00	100%
	Total	Rp. 9.713.882.308,00	100 %

Sumber: APBD Kab. Solok 2025

Sumber dana APBD Diskominfo Kabupaten Solok sebesar **Rp. 9.713.882.308,00** (Sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, yang mana belanja tersebut berasal dari APBD yaitu sebesar 100%. Anggaran APBD digunakan untuk membiayai 5 Program, 9 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan.

4) Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Kominfo, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika;
2. Kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang terbaharukan (*terupdate*) dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;
4. Belum optimalnya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah.

Tabel 1.7.
Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi.	Belum optimalnya pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
		Pemanfaatan sebagian aplikasi belum diiringi dengan penyusunan regulasi yang relevan.	Masih Rendahnya penyusunan regulasi untuk pemanfaatan aplikasi.
		Masih adanya daerah <i>Blankspace</i>	Kontur Wilayah Kabupaten Solok yang berbukit-bukit sehingga susahnya pengembangan pembangunan menara telekomunikasi dan jangkauan jaringan internet.
2	Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi Publik	Masih kurangnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi	Masih rendahnya komitmen Pemerintah dalam pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan informasi
3	Belum optimalnya Penerapan Satu Data Indonesia	Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan lemahnya validasi data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik	Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi penyediaan data statistik sektoral
		Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral.	masih rendahnya pemahaman beberapa OPD yang telah menyampaikan datanya sendiri saat dilakukan verifikasi dan validasi
			Masih rendahnya penyampaian data oleh OPD yang dikumpulkan oleh Diskominfo
4	Sistem informasi dan komunikasi belum memiliki sistem keamanan persandian	Belum ada regulasi yang mengatur tentang keamanan komunikasi dan informasi	Masih terbatasnya SDM pengelola keamanan informasi dan persandian sehingga belum tersedianya regulasi tentang keamanan komunikasi dan informatika
		Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awareness</i>)	Masih rendahnya pengetahuan aparatur dan masyarakat tentang keamanan informasi
		Belum optimalnya <i>Vulnerability Assessment</i> (VA) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi.	Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan pengamanan informasi, serta masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi

Sumber: Dinas Kominfo kab.Solok 2025

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 – 2029. Rumusan Rencana Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2025-2029 dan direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam pengelolaan Informasi dan Telematika terutama mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Diskominfo;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Diskominfo agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih periode tahun 2025-2029, yaitu:

“Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera ”

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih merupakan arah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan di Kabupaten Solok pada masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1	:	Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani
Misi 2	:	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global
Misi 3	:	Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya
Misi 4	:	Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terfokus pada Misi ke 1 (empat) yaitu **“Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani”**. Berpedoman pada Visi dan Misi, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Merupakan kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, melaksanakan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2025-2029, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain “Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi”

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran tersebut diformulasikan secara *SMART*, yaitu: *Specific*: Dapat diidentifikasi dengan jelas, *Measurable*: Jelas dan terukur, *Achievable*: Dapat dicapai sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan sumberdaya yang ada, *Relevant*: Ada keterkaitan antara target dengan tujuan, *Time Bond*: Ada jadwal waktu/periode pencapaian.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
- b. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
- c. Meningkatnya keamanan informasi
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Strategi Diskominfo secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi	:	Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menunju Masyarakat Madani Nan Sejahtera
Misi I	:	Mewujudkan Smart Government dan Berintegitas Dalam Melayani”
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi 2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik 3. Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 4. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 5. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal. 6. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK 7. Intensifikasi literasi digital masyarakat 8. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil 9. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 10. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 11. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten 12. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 13. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah

	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral 3. Penguatan statistik sektoral sesuai prinsip satu data indonesia
	Meningkatnya keamanan informasi	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif

Sumber: Diskominfo Kab.Solok tahun 2025

Tabel 2.2.
Tekni merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rensra PD	Ket
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja 2. Memanfaatkan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 3. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik 2. Mengoptimalkan pengelolaan media baik 	

			internal maupun eksternal	
		Meningkatkan implementasi layanan berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 2. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 3. Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik 	

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan Sinergitas kegiatan pembangunan TIK 5. Meningkatkan Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil 6. Meningkatkan Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 7. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten 9. Mengidentifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 	
--	--	---	--

2.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1.	Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)		49,04
2.	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)		0
	Meningkatnya	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,09

	layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	(Poin)		
	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan) (Indeks)		3,67
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		75

Sumber: Renstra Diskominfo Kab. Solok 2025-2029

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persen	81
	Terwujudnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	80
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,2
	Terwujudnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persen	85
	Terwujudnya penyediaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi	Persentase Indeks KAMI	Persen	40
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	83

	kinerja birokrasi			
	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	Indeks	3,26

Sumber: Renstra Diskominfo Kab. Solok 2021-2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja awal tahun 2025 pada tabel berikut:

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Penduduk Umur 15 - 64 Tahun yang Mengetahui Informasi Pembangunan Daerah		81
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik		86
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE		3,50
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,08
		Indeks KAMI		1,85

Sumber: Renstra Diskominfo Kab. Solok 2025-2029

2.4 Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu :

TABEL 2.6
PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025
SESUAI RENSTRA 2025-2029
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu
1.	Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3,201,384,240
2.	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,509,570,375
3.	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53,702,369
4.	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan) (Indeks)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	44,160,188
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3,905,065,136
Total				9,713,882,308

Sumber: Renstra Diskominfo Kab. Solok 2025-2029

Tabel 2.7
PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2025
SESUAI RENSTRA 2021-2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program	Pagu
1.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3,201,384,240
	Terwujudnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,509,570,375
	Terwujudnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi		
	Terwujudnya penyediaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53,702,369
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi	Persentase Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	44,160,188
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3,905,065,136
	Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur		
Total				9,713,882,308

Sumber: Renstra Diskominfo Kab. Solok 2021-2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Rencana Strategis 2025-2029

Pada Renstra 2025-2029 terdapat 5 Sasaran Strategis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mewujudkan sasaran, ditetapkan 5 indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk menilai Tingkat pencapaian sasaran tersebut.

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Pengertian

Indeks Masyarakat Digital (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survey IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan kembali dilaksanakan di tahun 2023.

Formulasi

1. Metode Kuantitatif
Survey kepada responden dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran kuesioner
2. Lokasi Survey
Dilaksanakan di Kabupaten Solok
3. Responden
Terdiri dari responden individu dan responden industri
4. Tools
Pelaksanaan menggunakan *computer-assisted personal interviewing (CAP)*

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	49,04	52,66	107,38

Sumber : <https://imdl.sdmdigital.id>

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) target 49,04 dan terealisasi sebesar 52,66 dengan capaian kinerja sebesar 107,38 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.2
Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2030 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	N/A	N/A	N/A	52,66	N/A	N/A	N/A	107,38	56,78	92,74%

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Sebesar 52,66 dengan capaian 107,38 persen. IMDI belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ini merupakan indikator baru pada Renstra 2025-2029. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2030) maka capaian kinerja sebesar 92,74 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	44,53	49,70	52,66

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 52,66 berada diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendapatkan capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang tinggi, Kabupaten Solok Tahun 2025 didukung oleh Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan provider

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel 3.4
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	49,04	52,66	107,38	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	541.549.328	456.640,658	84.32
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	102,231,520	93,861,647	91.81%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	44,160,188	41,250,764	93.41
Rata-rata capaian			107,38	Total Anggaran	687.941.036	591.753.069	86,01
Tingkat Efisiensi 13,99%							
Tingkat Efektivitas 124,84%							

Pada tabel 3.4 Indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tingkat efisiensinya sebesar 13,99% dan tingkat efektifitasnya 124,84% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 687.941.036,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 591.753.069,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator IMDI adalah karena adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan provider.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kerjasama dengan Provider dalam pengentasan daerah blankspot
2. Melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala terhadap infrastruktur IT di lingkungan pemerintah kabupaten solok
3. Pemerintah kabupaten solok sudah melaksanakan literasi digital kepada UMKM, sekolah dan lain-lain
4. Pemerintah daerah telah melaksanakan transformasi dari system manual ke layanan digital yang terintegrasi



Gambar : Peresmian Tower di Tigo Lurah

Tabel. 3.5
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	541.549.328	456,640,658	84.32
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	541.549.328	456,640,658	84.32
1.3	Penyusunan Konten	541.549.328	456,640,658	84.32
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	102,231,520	93,861,647	91.81

	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102,231,520	93,861,647	91.81
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	102,231,520	93,861,647	91.81
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	44,160,188	41,250,764	93.41
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44,160,188	41,250,764	93.41
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	44,160,188	41,250,764	93.41

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

2. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar pemerintah adalah instrumen pengukuran komprehensif, diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), untuk menilai sejauh mana instansi pusat dan daerah memanfaatkan teknologi guna efektivitas layanan publik, tata kelola (SPBE), serta efisiensi birokrasi

Formulasi Indeks Transformasi Digital (ITD) Pilar Pemerintah mengukur sejauh mana instansi memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik, tata kelola, dan kepercayaan masyarakat. Pengukuran tahunan oleh Kemenkomdigi (lagging 1 tahun) ini mencakup 104 indikator, memotret tahap fondasi, adopsi, dan akselerasi (skala 0-100).

Komponen Utama Formulasi Pilar Pemerintah:

- **Tata Kelola Digital:** Evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), manajemen data, dan integrasi kebijakan (Satu Data Indonesia).
- **Layanan Publik:** Tingkat digitalisasi pelayanan langsung kepada masyarakat dan efisiensi birokrasi.
- **Budaya Digital:** Kesiapan SDM/aparatur sipil negara (ASN) dalam mengadopsi pola pikir digital.
- **Infrastruktur & Keamanan:** Ketersediaan sarana TIK dan tingkat keamanan siber dalam layanan pemerintah.

Pengukuran ini menjadi acuan dalam RPJMN 2025-2029 untuk memacu transformasi digital di tingkat nasional maupun daerah

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	0	N/A	N/A

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Tahun 2025 Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah belum memiliki target dan realisasi karena belum ada penilaian dari pusat (Komdigi)

3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Pengertian Indikator :

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

Formulasi indikator :

$$\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$$

Dimana:

K adalah banyaknya domain penilaian

Bobot Domain k adalah nilai indeks domain ke – k;

Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke- k;

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indek Pembangunan Statistik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	2,09	2,08	99,52

Sumber : bidang statistik dan GCIO Dinas Kominfo

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa target Indek Pembangunan Statistik (IPS) 2,09 realisasi sebesar 2,08 capaian 99,52 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.8
Perkembangan Indek Pembangunan Statistik (IPS)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2030 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	1,64	1,48	2,08	2,08	100	100	115,55	99,52	2,15	96,74

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.8 dapat dilihat bahwa Realisasi Indek Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2025 sama dengan tahun sebelumnya namun capaiannya mengalami penurunan karena adanya kenaikan target.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indek Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Indek Pembangunan Statistik (IPS)

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Indek Pembangunan Statistik (IPS)	2,35	2,87	2,08

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa nilai Indek Pembangunan Statistik (IPS) kabupaten solok Tahun 2025 sebesar 2,08 berada dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu 2,87 dan Nasional sebesar 2,35.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indek Pembangunan Statistik

(IPS) Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- 1) Pemerintah kabupaten Solok sudah menerapkan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan Peraturan Bupati Solok No 27 Tahun 2021 tentang SDI Tingkat Daerah yang memuat tentang Penerapan Prinsip SDI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- 2) Penerapan Proses Bisnis Statistik di Pemerintah Kabupaten Solok pada aspek penyebarluasan data terkait diseminasi data sudah baik.
- 3) Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel Terkait Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik sudah dilakukan secara menyeluruh.
- 4) Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik Terkait penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan serta terkait penggunaan data statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan telah dilakukan oleh produsen data bersama wali data sesuai kepentingan Pemerintahan Kabupaten Solok.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.10
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Keuangan			
	Target	Realisasi	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indek Pembangunan Statistik (IPS)	2,09	N/A	N/A	Program penyelenggaraan statistik sektoral	53,702,369	51,181,100	95.31%
Rata-rata capaian			N/A	Total Anggaran	53,702,369	51,181,100	95.31%
Tingkat Efisiensi 4,69%							
Tingkat Efektivitas 0%							

Berdasarkan pada table 3.10 dapat dilihat pada Indikator Indek Pembangunan Statistik (IPS) tingkat efisiensinya sebesar % dan tingkat efektifitasnya 0 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53,702,369,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51,181,100,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Indek Pembangunan Statistik (IPS) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Statistik terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kab.Solok Dalam Angka



Gambar : Rapat Forum Grup Discussion (FGD) Penyusunan Publikasi Kab Solok Dalam Angka

2. Melaksanakan Coaching Clinic Penyusunan Metadata Statistik Sektoral



Gambar : Kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Metadata Statistik Sektoral

3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Metadata Statistik Sektoral ke OPD



Gambar : Persiapan evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPPS)

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	53,702,369	51,181,100	97,03
1	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah Kabupaten/ Kota	53,702,369	51,181,100	97,03
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9,349,764	9,089,700	97.22
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu data Indonesia	44,352,605	42,091,400	94,90

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

4. Indeks SPBE (terkait keamanan)

Indeks SPBE (terkait keamanan) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan

dan efektivitas penerapan aspek keamanan dalam penyelenggaraan SPBE. Ini mencakup penilaian terhadap kebijakan, tata kelola, manajemen, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam konteks keamanan. Indikator terkait adalah: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Formulasi

Indeks SPBE (terkait keamanan) = 3 Indikator SPBE terkait keamanan

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indeks SPBE (terkait keamanan) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Indeks SPBE (terkait keamanan)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indeks SPBE (terkait keamanan)	3,67	3,67	100

Sumber : Laporan Hasil Prmantauan SPBE Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.12 dapat dilihat bahwa target Indeks SPBE (terkait keamanan) 3,67 realisasi 3,67 dan capaian 100 persen dengan nilai Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 5, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 3, dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 3.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.13
Indeks SPBE (terkait keamanan)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2030 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Indeks SPBE (terkait keamanan)	N/A	N/A	3,5	3,67	N/A	N/A	100	100	5	73,4

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks SPBE (terkait keamanan) 3,67 dengan capaian sebesar 100 Persen, tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya **mengalami peningkatan**, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2030) sebesar 5 maka capaian kinerja sebesar 73,4.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indeks SPBE (terkait keamanan) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14
Indeks SPBE (terkait keamanan)

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Indeks SPBE (terkait keamanan)	N/A	N/A	3,67

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.14 dapat dilihat bahwa Indeks SPBE (terkait keamanan) Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 3,67 sementara untuk nilai Provinsi dan Nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks SPBE (terkait keamanan) Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel 3.15
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks SPBE (terkait keamanan)	3,67	3,67	100	Program aplikasi informatika	20.229.118	19.176.080	94.79
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	20.229.118	19.176.080	94.79
Tingkat Efisiensi 5,21%							
Tingkat Efektivitas 105,49%							

Berdasarkan pada table 3.15 dapat dilihat pada Indikator Indeks SPBE (terkait keamanan) tingkat efisiensinya sebesar 5,21% dan tingkat efektifitasnya 105,49% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.509.570.375,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.471.156.937,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Indeks SPBE (terkait keamanan) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indeks SPBE (terkait keamanan) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan rapat tindaklanjut hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024.



- Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025



Gambar : Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indek Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.16
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program aplikasi informatika	20.229.118	19.176.080	94.79
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.229.118	19.176.080	94.79
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	20.229.118	19.176.080	94.79

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pengertian Indikator :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yati Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda terhadap Dokumen Perencanaan OPD

Formulasi indikator :

Hasil reviu akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

Penilaian ini didapat berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu :

- 1) perencanaan kinerja
- 2) pengukuran kinerja
- 3) pelaporan kinerja
- 4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Dari hasil Penilaian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mendapat nilai 70,05 dengan kategori BB atau **sangat baik**. Dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.17
Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup(Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut:

Tabel 3.18
Nilai SAKIP Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	74,40	99,2

Sumber : Hasil Evaluasi LKJIP oleh Inspektorat Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.25 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 74,40 dengan capaian kinerja sebesar 99,2 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.19
Perkembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2030 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,44	70,80	70,05	74,40	101,80	87,40	85,42	99,2	81	91,85

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.19 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya **mengalami kenaikan** dan realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2030) sebesar 74,40 dengan target 81 dan capaian kinerja sebesar 91,85 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/a	74,40

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.20 dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 74,40, untuk perbandingan nilai akuntabilitas kinerja dengan provinsi dan nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- Dokumen rencana kinerja tahunan telah memenuhi kriteria penyusunan dokumen perencanaan.
- Tercapainya pemenuhan dokumen Renstra, Kualitas Renstra dan implementasi renstra.
- Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja

2. Faktor Penghambat
 - Rencana Aksi belum memuat Langkah-langkah nyata dalam pencapaian target
 - Dalam pengukuran Kinerja belum memiliki SOP
3. Solusi
 - Menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah nyata
 - Menetapkan SOP pengukuran kinerja

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.21
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	70,05	85,42	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	223,743,494	219,837,424	98,25
Rata-rata capaian			85,42	Total Anggaran	223,743,494	219,837,424	98,25
Tingkat Efisiensi 1,31%							
Tingkat Efektivitas 115,53%							

Berdasarkan pada table 3.21 dapat dilihat pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tingkat efisiensinya sebesar 1,31% dan tingkat efektifitasnya 115,53% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 169,942.512,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.716.512,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
2. Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas kinerja



Gambar : Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Ruang Kepala Dinas Kominfo

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.22
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	223,743,494	219,837,424	98,25
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	33,002,887	32,666,190	98.98%
1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	144,489,636	142,829,792	98.85%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah			
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12,354,637	11,789,410	95.42%
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18,307,786	17,400,302	95.04%
2.4	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	15,588,548	15,151,730	97.20%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

3.2. Rencana Strategis 2021-2026

Pada Renstra 2021-2026 terdapat 5 Sasaran Strategis yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam rangka mewujudkan sasaran, ditetapkan 8 indikator kinerja sebagai tolak ukur untuk menilai Tingkat pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik

Pengertian Indikator :

Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah merupakan diseminasi informasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok kepada masyarakat umur 15-64 tahun melalui media online, media cetak dan media elektronik

Formulasi indikator :

Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah diukur dengan **Jumlah Penduduk Umur 15-64 Tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah dibagi dengan Jumlah penduduk umur 15-64 Tahun di kali 100%**.

Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah diperoleh melalui Survei **Kuesioner Online** yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 5 pertanyaan dan 1 saran sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Jumlah responden ditentukan berdasarkan Metode Slovin Formula. Langkah awal menentukan jumlah penduduk Kabupaten Solok, yaitu sebanyak 415.846 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk usia Produktif (15 sampai 64 tahun) adalah sebanyak 297.182 orang, dengan menggunakan Metode Slovin Formula diperoleh jumlah responden dalam satu periode IKM adalah 500 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak yang terdiri dari 315 orang laki dan 185 orang perempuan dengan persentase sebagai berikut:



Setelah dilakukan survey online diketahui 405 orang memperoleh informasi sedangkan 95 tidak, dengan persentase layanan sebagai berikut:



Responden memperoleh informasi dari sumber yang berbeda-beda, lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari grafik diketahui ada 9 sumber informasi responden yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu media online yang terdiri dari Web Pemda, Berita Online; Media Sosial terdiri dari Facebook, Instagram dan Youtube; Media cetak yang terdiri dari koran/majalah dan baliho/spanduk; media elektronik terdiri dari radio, videotron; untuk media lainnya bisa diperoleh dari informasi perseorangan dengan jumlah seperti dalam grafik.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.23 sebagai berikut:

Tabel 3.23
Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	81%	81%	100%

Sumber : Dinas Kominfo 2025

Berdasarkan tabel 3.23 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indeks Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah dengan target 81 persen dan terealisasi sebesar 81 persen dengan capaian kinerja sebesar seratus persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.24
Perkembangan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1.	Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah	78	79	80	81	100	100	100	100	82	98,78

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.24 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 80 persen, maka capaian kinerja sebesar 98,78 persen\

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan

daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.25 di bawah ini:

Tabel 3.25
Perbandingan Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah	N/A	N/A	81%

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.25 dapat dilihat bahwa Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 belum dapat diperoleh perbandingan realisasi dengan standar nasional maupun dengan provinsi.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi Pembangunan daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan dan solusi sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

- 1) Masyarakat kabupaten Solok lebih banyak menerima keterbukaan informasi seputar pembangunan kabupaten solok melalui Media Sosial, berita Online, Baliho/Spanduk, dan Website Pemerintah.
- 2) Sedangkan yang terendah masyarakat Kabupaten Solok menerima Keterbukaan Informasi seputar pembangunan Kabupaten Solok melalui Radio dan Youtube.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel 3.26
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah	81	81	100	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	3,201,384,240	2,915,805,346	91,08

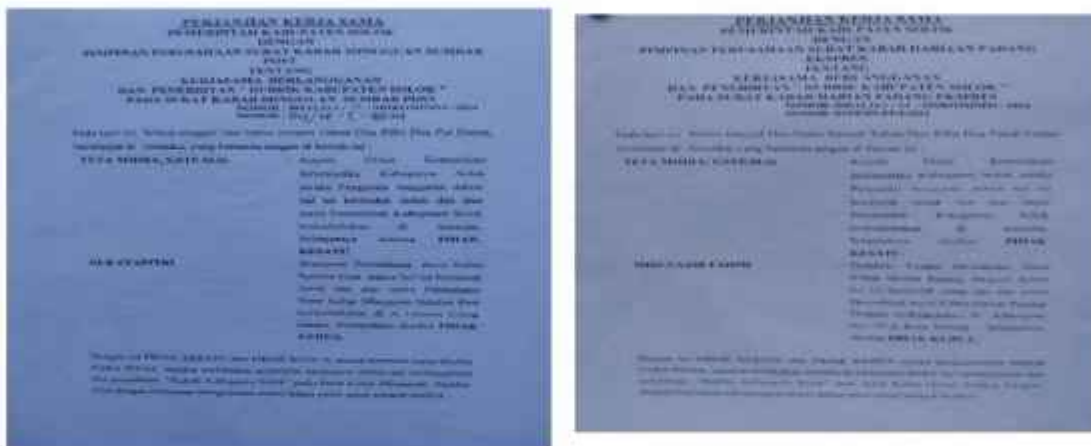
Rata-rata capaian	100	Total Anggaran	3,201,384,240	2,915,805,346	91,08
Tingkat Efisiensi 8,92%					
Tingkat Efektivitas 109,79%					

Pada tabel 3.26 Indikator Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi Pembangunan daerah di Kabupaten Solok tingkat efisiensinya sebesar 8,92% dan tingkat efektifitasnya 109,79% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3,201,384,240,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,915,805,346 ,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi Pembangunan daerah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kerjasama dengan media cetak, media online dan elektronik dalam hal penyebarluasan informasi kegiatan Pembangunan daerah.



Gambar : Kontrak Kerjasama dengan Mingguan dan media harian



Gambar : Kegiatan Jumpa Pers dengan Kepala Daerah

2. Melaksanakan penyebaran informasi kegiatan pemerintah daerah melalui web. Pemda, berita online, media sosial (facebook, instagram dan youtube), media elektronik (radio dan videotron)



3. Melaksanakan sosialisasi kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah daerah



4. Melaksanakan coaching clinic Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional



Gambar : Rapat coaching clinic Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Persentase penduduk umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.27
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3,201,384,240	2,915,805,346	91,08
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
1.1.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	57.406.996	47.865.079	83,38
1.2.	Pelayanan Informasi Publik	25,642,798	18,387,130	71.70
1.3	Penyusunan Konten	541.549.328	456,640,658	84.32
1.4	Relasi Media	2,576,785,118	2,392,912,479	92.86

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Pengertian Indikator :

Nilai Keterbukaan Informasi publik merupakan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang metode dan teknik evaluasi keterbukaan informasi badan publik

Formulasi indikator :

Nilai indeks keterbukaan informasi publik diperoleh berdasarkan penilaian komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi, bahwa indikator utama dilevel badan publik meliputi 4 indikator:

1. Pengembangan website
2. Pengumuman informasi publik
3. Pelayanan informasi publik
4. Penyediaan Informasi Publik

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.28 sebagai berikut

Tabel 3.28
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	39,4	49

Sumber : Keputusan Komisi Informasi Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.28 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target 80 persen dan terealisasi sebesar 39,4 persen dengan capaian kinerja sebesar 49 persen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2025.

Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/KEP/KI-PSB/XI/2025 tentang penetapan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2025 ketua komisi informasi provinsi sumatera barat, dimana Kabupaten Solok mendapat Nilai sebesar 39,4 persen.

Kalau melihat kepada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, dimana target kinerja Tahun 2025 dinaikan menjadi 86 % dari target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 80. Jika melihat realisasi Tahun 2025 terjadi penurunan dan target tidak tercapai. Ini disebabkan karena:

1. Sarana dan Prasarana Pendukung PPID Terbatas. belum adanya ruangan Front Office PPID yang nyaman

2. Belum Optimalnya Kebijakan dan Regulasi Internal. Perbup dan SK belum di update sesuai peraturan KI yang baru.
3. Minimnya Komitmen dan Dukungan Pimpinan OPD. Kurangnya dorongan pimpinan dalam penyediaan dan pembaruan data serta informasi publik.
4. Keterbatasan Anggaran Khusus Keterbukaan Informasi

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.29
Perkembangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2025	2021	2022	2023	2025	Target (%)	Capaian
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	40,58	84,89	78,52	39,4	67,63	130,6	112,17	49	85	46,35

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.29 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami penurunan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami penurunan** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 49 persen, maka capaian kinerja sebesar 46,35 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel 3.30
Perbandingan Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	N/A	N/A	39,4%

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.30 dapat dilihat bahwa Nilai keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 39,4 persen sementara Pemerintah Provinsi dan Nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi, dapat diketahui bahwa :

- Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi pengelolaan Daftar Informasi Publik yaitu telah tersedianya aplikasi PPID Kabupaten Solok
- Telah diterbitkannya SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.31
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	80	39,4	49	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	25.642.798	18.387.130	72
Rata-rata capaian			49	Total Anggaran	25.642.798	18.387.130	72
Tingkat Efisiensi 28%							
Tingkat Efektivitas 68,5%							

Berdasarkan pada table 3.31 dapat dilihat pada Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik tingkat efisiensinya sebesar 28 % dan tingkat efektifitasnya 68,5% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.642.798,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.387.130,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Permintaan Data PPID Untuk Penilaian Kabupaten Peduli HAM dari Bagian Hukum

2. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik tahun 2025.
3. Mengikuti Penilaian IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) Bersama BKD ,Bappeda dan Inspektorat
 - Upload Dokumen Ke website Pemda untuk penilaian di dimensi 3
4. Melaksanakan Pengumpulan, verifikasi DIP dan DIK
5. Melaksanakan Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Pemda serta persiapan Monev Keterbukaan Informasi untuk Nagari dan Bumrag
 - Nagari Cupak, Talang Babungo, nagari Salimpek dan BUMNAG Rankiang Ameh
6. Melayani Permintaan Informasi Publik dari Masyarakat/LSM dan lainnya.
7. Bimtek Penguatan Kelembagaan PPID



Gambar : Bimtek Penguatan kelembagaan PPID

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.32
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	25.642.798	18.387.130	72
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	25.642.798	18.387.130	72
1.1.	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	25.642.798	18.387.130	72

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

3. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pengertian Indikator :

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Formulasi indikator :

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

Dimana:

- Indeks domain_i adalah nilai indeks domain ke-i
- BD_i adalah nilai bobot domain ke-i
- NA_{ij} adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i
- BA_{ij} adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i

Dalam penilaian Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik Tahun 2025 terdiri dari 4 Domain dan 7 Aspek di tambah dengan 47 indikator sebagaimana tertera dibawah ini :

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Untuk perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator dapat dilihat pada table 3.33 berikut :

Tabel. 3.33

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

NO	INDIKATOR	NILAI TINGKAT KEMATANGAN 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data 2	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan SPBE 2025

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa nilai tingkat kematangan indikator yang berada dibawah target minimal 3, dimana terdapat 7 (tujuh) nilai tingkat kematangan indikator yang mendapat nilai 2 dan 2 (dua) nilai Tingkat kematangan indicator yang mendapat nilai 1 (satu) antara lain pada aspek perencanaan strategis terdapat 4 (empat) indicator (11-14), aspek penerapan manajemen SPBE terdapat 2 (dua) indikator (21-28), aspek pelaksanaan audit TIK terdapat 3 (tiga) indikator (29-31), selebihnya mendapat nilai tingkat kematangan indikator diatas target minimal.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.34 sebagai berikut :

Tabel 3.34
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	3,71	103,05

Sumber : Sumber: Laporan Hasil Pemantauan SPBE 2025

Berdasarkan tabel 3.34 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 3,60 dan terealisasi sebesar 3,71 dengan capaian kinerja sebesar 103,05 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.35
Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	3,12	3,49	3,49	3,71	124,8	124,6	99,71	103,05	3,4	109,11%

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.35 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami Peningkatan** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) dengan realisasi sebesar 3,71, maka capaian kinerja sebesar 109,11 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.36 di bawah ini :

Tabel 3.36
Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	N/A	3,71

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.36 dapat dilihat bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 3,71 sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penilaian dari Kemenpan& RB, dapat diketahui bahwa :

- 1) Adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok. Kebijakan Internal Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati No 27 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi dan Audit TIK dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati No.20 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola SPBE. Kebijakan internal Tim koordinasi Keppup No: 490-275-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi SPBE.
- 2) Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok, yaitu: Layanan Pusat Data telah memiliki prosedur baku dalam pengoperasiannya yang di manfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan telah dievaluasi Layanan Jaringan Intra telah memiliki prosedur baku dalam pengoperasiannya yang di manfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah dan telah dievaluasi.
- 3) Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok, yaitu: Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinator SPBE, yang meliputi rapat evaluasi dan monitoring implementasi SPBE dengan mengundang seluruh pihak-pihak yang terkait dan telah dievaluasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Solok telah melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman dalam melakukan kolaborasi penerapan SPBE dan telah dievaluasi serta ditindaklanjuti.
- 4) Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok, yaitu: Penerapan Manajemen Perubahan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok telah dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan pedoman Manajemen Perubahan dan telah dievaluasi Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Kabupaten Solok berdasarkan pedoman yang ada pada Peta Rencana Manajemen SPBE Kabupaten Solok (Perbup SPBE Nomor 20 Tahun 2021) dan telah dievaluasi.
- 5) Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok, yaitu: Pelaksanaan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan menggunakan SIPD yang telah terintegrasi satu sama lain Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah menggunakan SPSE Layanan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi kepegawaian SIMPEG yang telah terintegrasi dengan aplikasi SAPK dengan penambahan fitur untuk kenaikan pangkat otomatisid SIKEPO Layanan kearsipan telah menggunakan aplikasi berbagi pakai Srikandi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi menggunakan aplikasi SILAKIP. Layanan Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi Kinerja Pegawai (SITUNKIN) yang telah terintegrasi dengan SIMPEG.
- 6) Adanya beberapa kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Solok, yaitu: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik menggunakan aplikasi SP4N Lapor Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menggunakan sistem situs <https://jdihildis.solokkab.go.id/> yang telah terintegrasi dengan JDIHN Layanan Sektor Publik 1 adalah Layanan Informasi <https://ppid.solokkab.go.id/> dan telah dievaluasi

- 1) Layanan Sektor Publik 2 yaitu Aplikasi E-KIR telah memiliki fitur transaksi dan terintegrasi dengan Aplikasi Kementerian Perhubungan yaitu Aplikasi Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe). Layanan Sektor Publik 3 adalah aplikasi SISFO IZIN (<https://sisfoizin.solokkab.go.id>). Aplikasi SISFO IZIN telah melakukan kolaborasi dengan Aplikasi lain dalam penerapannya.
1. Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur Indek Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah Kabupaten Solok masih memiliki beberapa kelemahan yaitu dokumen Masterplan Teknologi Informasi Pemkab Solok tahun 2021-2025 yang berisi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE yang baru sebagian mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Keterpaduan Rencana dan Anggaran, belum sepenuhnya dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Belum terlihat adanya inovasi proses bisnis berdasarkan proses bisnis yang ada (as-is).
 - 2) Pemerintah Kabupaten Solok masih memiliki klemahan pada Aspek Penerapan Manajemen Data, yaitu: Pada Penerapan Manajemen data, pedoman belum mencakup pengelolaan Data secara lengkap Penerapan Manajemen aset TIK belum didukung dengan data yang memadai.
 - 3) Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Pemerintah Kabupaten Solok masih memiliki kelemahan yaitu: Bukti yang kurang memadai pada pelaksanaan Audit Infrastruktur Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Solok adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Keamanan SPBE sesuai pedoman, tetapi belum dilaksanakan oleh auditor internal
 2. Solusi atau rencana tindaklanjut yang akan dilakukan :
Untuk mencapai keberlanjutan dan perbaikan, diperlukan konsultasi lebih intensif dengan unit pengelola TIK, penguatan inovasi dalam perencanaan strategis, serta pelaksanaan audit TIK yang lebih komprehensif dengan dukungan bukti memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Solok mampu memaksimalkan potensi SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien

A. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.37
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	3,71	103,05	Program aplikasi informatika	20.229.118	19.176.080	94,79
Rata-rata capaian			103,05	Total Anggaran	20.229.118	19.176.080	94,79
Tingkat Efisiensi 5,21%							
Tingkat Efektivitas 105,49%							

Berdasarkan pada table 3.37 dapat dilihat pada Indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat efisiensinya sebesar 5,21% dan tingkat efektifitasnya 105,49 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.229.118,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.176.080,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat tindaklanjut hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024.



2. Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025



Gambar : Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2025.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.38
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program aplikasi informatika	20.229.118	19.176.080	94.79
1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.229.118	19.176.080	94.79
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	20.229.118	19.176.080	94.79

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi

Pengertian Indikator :

Layanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau entitas yang didanai oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih, pengangkutan umum, dan banyak lagi.

Formulasi indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100$$

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.39 sebagai berikut :

Tabel 3.39
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85 %	85%	100

Sumber : Keputusan Menpan & RB Nomor 663 Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.39 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **dapat tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 80 dan terealisasi sebesar 85 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.40
Perkembangan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75	78	80	85	100	100	100	100	90	94,44

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.40 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) dengan realisasi sebesar 85 persen, maka capaian kinerja sebesar 94,44 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.41 di bawah ini :

Tabel 3.41
Perbandingan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	85 %

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.41 dapat dilihat bahwa Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 85 persen, namun belum dapat diperoleh perbandingan realisasi kinerja baik dengan standar nasional dan provinsi.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- 1) Penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sangat sejalan dengan capaian SPBE
- 2) Kabupaten Solok cukup aktif dalam memanfaatkan aplikasi dari pemerintah pusat atau daerah lain yang relevan
- 3) Kordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.42
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85%	85%	100	Program aplikasi informatika	102,231,520	93,861,647	92
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	102,231,520	93,861,647	92
Tingkat Efisiensi 8%							
Tingkat Efektivitas 108,69%							

Berdasarkan pada table 3.42 dapat dilihat pada Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tingkat efisiensinya sebesar 8% dan tingkat efektifitasnya 108,69% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 102,231,520,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 93,861,647,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis sistem informasi desa (OpenSID) ke Nagari



2. Melaksanakan Pengembangan Aplikasi



Tahukah Kamu?

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.43
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program aplikasi informatika	102,231,520	93,861,647	91,81
1.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	102,231,520	93,861,647	91,81
1.1	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	102,231,520	93,861,647	91,81

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

5. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan daerah

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 44
Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.45
Perkembangan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok Tahun 2025

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2025 yaitu target 100%, terealisasi sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 100% capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 100%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Perbandingan realisasi kinerja dalam persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.46
Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	N/A	N/A	100%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2025

Pencapaian IKU persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2025 memiliki target 100% dan terealisasi 100%. Namun belum ada data yang dapat dijadikan pedoman perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional dan Provinsi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Data statistik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan, salah satu produk statistik yang dihasilkan setiap tahun adalah Daerah Dalam Angka (Kabupaten Solok Dalam Angka). Dinas Kominfo Dalam penyusunan dokumen perencanaan mengacu kepada dokumen Daerah Dalam Angka.

agar perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan tepat, dibutuhkan ketersediaan data yang akurat mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakai untuk itu pelaksanaan statistik daerah harus menganut prinsip satu data indonesia pada satu sumber/portal resmi daerah.

E. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan atau penyusunan data statistik Pemerintah Kabupaten Solok telah membentuk forum satu data tingkat Kabupaten Solok yang terdiri dari BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, Bapelitbang sebagai koordinasi atau sekretariat data dan OPD sebagai produsen data.

Tabel 3.47
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan	100	100	100	Program penyelenggaraan statistik sektoral	53,702,369	51,181,100	95,31

evaluasi pembangunan daerah)							
Rata-rata capaian		100	Total Anggaran	53,702,369	51,181,100	95,31	
Tingkat Efisiensi 4,69%							
Tingkat Efektivitas 104,92%							

Berdasarkan pada table 3.47 dapat dilihat pada Indikator Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah tingkat efisiensinya sebesar 4,69% dan tingkat efektifitasnya 104,92% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53,702,369,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 51,181,100,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator target persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

- Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Pembangunan Statistik terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.48
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	53,702,369	51,181,100	97,03%
1	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah Kabupaten/ Kota	53,702,369	51,181,100	97,03%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9,349,764	9,089,700	97%
1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu data Indonesia	44,352,605	42,091,400	95%

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Terkait penyelenggaraan data statistik sektoral di Kabupaten Solok perlu optimalisasi pelaksana peran forum Satu Data Indonesia, Solok Dalam Angka menghasilkan data **statistik sektoral yang akurat dan berkualitas.**

6. Indek Keamanan Informasi (KAMI)

Pengertian Indikator :

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022.

Formulasi indikator :

$$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{jumlah area penilaian}} \times 5$$

Penilaian ini didapat berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok dengan mengisi lembar evaluasi yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terdiri dari beberapa kategori antara lain:

- 1) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 4) Pengelolaan Aset Informasi, dan
- 5) Teknologi dan Keamanan Informasi
- 6) Pelindungan Data Pribadi
- 7) Suplemen: Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan.

Dari hasil Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dari jumlah 645 (Enam Ratus Empat Puluh Lima) area yang dinilai, baru 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) area yang memenuhi tingkat kematangan sehingga Indek Keamanan Informasi termasuk kategori tidak layak.

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Indikator Indek Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.49 sebagai berikut :

Tabel 3.49
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Indek Keamanan Informasi (KAMI)	1,85	1,85	100

Sumber : Dinas Kominfo 2025

Berdasarkan tabel 3.49 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana

pada Tahun 2025 target Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan target 1,85 dan terealisasi sebesar 1,85 dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.50
Perkembangan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir Renstra)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1,56	1,65	1,75	1,85	100	100	100	100	1,95	94,87

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.50 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami peningkatan** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 1,85, maka capaian kinerja sebesar 94,87 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.51 di bawah ini :

Tabel 3.51
Perbandingan Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A	N/A	1,85

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.51 dapat dilihat bahwa Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 1,85 sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional data belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta

solusi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan Dinas Kominfo terhadap Keamanan Informasi terdapat bahwa :

- 1) Seluruh OPD sudah menerapkan pelaksanaan program keamanan informasi
- 2) Seluruh OPD sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.52
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indek Keamanan Informasi (KAMI)	1,75	1,75	100	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	44,160,188	41,250,764	93%
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	44,160,188	41,250,764	93%
Tingkat Efisiensi 7%							
Tingkat Efektivitas 107,52%							

Berdasarkan pada table 3.52 dapat dilihat pada Indikator Indek Keamanan Informasi (KAMI) tingkat efisiensinya sebesar 7% dan tingkat efektifitasnya 107,52% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44,160,188,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41,250,764,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Indek Kemamanan Informasi (KAMI) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Indek Keamanan Informasi (KAMI) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pejabat eselon II dan III
2. Mengikuti Bimbingan Teknis Tenaga Sandiman untuk peningkatan kompetensi
3. Melaksanakan pemulihan insiden keamanan informasi dan mendeteksi kerentanan sistem informasi



Gambar : Kunjungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Keamanan Informasi di Kabupaten Solok

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di Kabupaten Solok adalah :

Tabel. 3.53
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	44,160,188	41,250,764	93%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44,160,188	41,250,764	93%
1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	44,160,188	41,250,764	93%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pengertian Indikator :

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yati Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda terhadap Dokumen Perencanaan OPD

Formulasi indikator :

Hasil revidu akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

Penilaian ini didapat berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu :

- a. perencanaan kinerja
- b. pengukuran kinerja
- c. pelaporan kinerja
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Dari hasil Penilaian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mendapat nilai 70,05 dengan kategori BB atau **sangat baik**. Dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.54
Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup(Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.55 sebagai berikut:

Tabel 3.55
Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	83	74,40	89,63

Sumber : Hasil Evaluasi LKJiP oleh Inspektorat Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.55 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target 83 dan terealisasi sebesar 74,40 dengan capaian kinerja sebesar 89,63 persen.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.56
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Persentase)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (%)	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,44	70,80	70,05	74,40	101,80	87,40	85,42	89,63	84	88,57

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.56 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya **mengalami kenaikan** dan realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) dengan realisasi sebesar 74,40 dan capaian kinerja sebesar 88,57 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.57 di bawah ini :

Tabel 3.57
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	N/A	N/a	74,40

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.57 dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 74,40, untuk perbandingan nilai akuntabilitas kinerja dengan provinsi dan nasional belum tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- Dokumen rencana kinerja tahunan telah memenuhi kriteria penyusunan dokumen perencanaan.
- Tercapainya pemenuhan dokumen Renstra, Kualitas Renstra dan implementasi renstra.
- Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja

Faktor Penghambat

- Rencana Aksi belum memuat Langkah-langkah nyata dalam pencapaian target

- Dalam pengukuran Kinerja belum memiliki SOP

Solusi

- Menyusun rencana aksi yang memuat langkah-langkah nyata
- Menetapkan SOP pengukuran kinerja

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.58
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	82	70,05	85,42	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	223,743,494	219,837,424	98,25
Rata-rata capaian			85,42	Total Anggaran	223,743,494	219,837,424	98,25
Tingkat Efisiensi 1,31%							
Tingkat Efektivitas 115,53%							

Berdasarkan pada table 3.58 dapat dilihat pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tingkat efisiensinya sebesar 1,31% dan tingkat efektifitasnya 115,53% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 169,942.512,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 167.716.512,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
2. Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas kinerja



Gambar : Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Ruang Kepala Dinas Kominfo

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.59
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	223,743,494	219,837,424	98,25
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	33,002,887	32,666,190	98.98%
1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	144,489,636	142,829,792	98.85%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah			
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12,354,637	11,789,410	95.42%
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18,307,786	17,400,302	95.04%
2.4	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	15,588,548	15,151,730	97.20%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025.

1. Nilai Kepuasan Aparatur

Pengertian Indikator :

Nilai indeks kepuasan aparatur memberi gambaran tentang kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pelayanan dengan penerima pelayanan publik.

Formulasi indikator :

Nilai Kepuasan Aparatur dilaksanakan berdasarkan survey terhadap pelayanan publik dengan menggunakan 10 unsur sebagai dasar pengukuran survey sebagai berikut:

Tabel 3.60
10 unsur sebagai dasar pengukuran survey terhadap pelayanan publik

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		TIDAK SETUJU	RAGU RAGU	SETUJU	SANGAT SETUJU
1	Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang				
2	Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang				
3	Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll)				
4	Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik				
5	Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik				
6	Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dapat terpenuhi dengan baik				
7	Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik				
8	Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik				
9	Ketepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)				
10	Fasilitas ruang rapat sudah baik				

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2025

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.61 sebagai berikut:

Tabel 3.61
Nilai Kepuasan Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Nilai Kepuasan Aparatur	3,26	3,35	102,76

Sumber : Dinas Kominfo 2025

Berdasarkan tabel 3.61 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada Tahun 2025 **tercapai**, dimana pada Tahun 2025 target Nilai Kepuasan Aparatur dengan target 3,26 dan terealisasi sebesar 3,33 dengan capaian kinerja sebesar 102,76 persen.

Dari hasil survei tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mendapat nilai 3,33 dengan kategori A atau **sangat baik**. Dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.62
Kategori Nilai Kinerja

Nilai interval IKM	Nilai interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2025

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra

Tabel 3.63
Perkembangan Nilai Kepuasan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target	Capaian
1	Nilai Kepuasan Aparatur	3,29	3,32	3,34	3,35	131,07	122,96	111,33	102,76	3,35	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Solok tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.63 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Kepuasan Aparatur tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami kenaikan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir **mengalami penurunan** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan realisasi sebesar 3,35, maka capaian kinerja sebesar 100 persen.

C. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Perbandingan Nilai Kepuasan Aparatur Tahun 2025 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.64 di bawah ini :

Tabel 3.64
Perbandingan Nilai Kepuasan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1	Nilai Kepuasan Aparatur	-	-	3,35

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2025

Dari tabel 3.64 dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2025 sebesar 3,35, untuk perbandingan nilai Kepuasan Aparatur dengan provinsi dan nasional tidak tersedia.

D. Analisis pendukung atau penyebab keberhasilan peningkatan dan hambatan kegagalan/penurunan kinerja serta solusinya

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Kepuasan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung dan hambatan serta solusi sebagai berikut sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melalui bidang sekretariat memberikan pelayanan dari sisi sarana dan prasarana serta peralatan kantor, surat menyurat, kebersihan kantor, keuangan dan dan lain-lain dapat terpenuhi dengan baik.

E. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Tabel. 3.65
Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

IKU	Kinerja			Program	Keuangan		
	Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Kepuasan Aparatur	3,26	3,35	102,76	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	3,905,065,136	3,574,448,863	91.53
Rata-rata capaian			102,76	Total Anggaran	3,905,065,136	3,574,448,863	91.53
Tingkat Efisiensi 8,47%							
Tingkat Efektivitas 109,25%							

Berdasarkan pada table 3.65 dapat dilihat pada Indikator Nilai Kepuasan Aparatur tingkat efisiensinya sebesar 8,47% dan tingkat efektifitasnya 109,25% dengan pagu anggaran sebesar Rp.3,905,065,136,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3,574,448,863,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Nilai Kepuasan Aparatur didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

F. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Kepuasan Aparatur terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kominfo
2. Memfasilitasi surat menyurat
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Kominfo
4. Memfasilitasi kebersihan dilingkungan Dinas Kominfo

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Nilai Kepuasan Aparatur di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 3.66
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub.kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten /Kota	3,905,065,136	3,574,448,863	91.53
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	33,002,887	32,666,190	98.98
1.2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	144,489,636	142,829,792	98.85
2	Administrasi keuangan perangkat daerah			
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,990,520,416	2,711,476,552	90.67
2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12,354,637	11,789,410	95.42
2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18,307,786	17,400,302	95.04
2.4	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	15,588,548	15,151,730	97.20
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3,321,000	2,637,360	79.41
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123,771,755	112,895,250	91.21
3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	14,644,200	13,344,420	91.12

3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,205,149	6,935,835	84.53%
3.5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120,405,000	118,154,032	98.13%
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	563,750	500,000	88.69%
4.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75,194,100	62,813,196	83.53%
4.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	86,913,229	86,045,447	99.00%
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	230,928,043	215,429,347	93.29%
	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	26,855,000	24,380,000	90.78%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Tahun 2025

Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas. Target dan realisasi pendapatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.67 berikut :

Tabel 3.67
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
1.	Retribusi Penyewaan bangunan (Video tron)	1.250.000	900.000	72%
2.	Retribusi Penyewaan bangunan (radio)	25.000.000	-	-
Total		26.250.000	900.000	3,42%

Sumber: Laporan Keuangan Diskominfo Kab. Solok Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, target pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp.26.250.000,- yang bersumber dari Retribusi Penyewaan Bangunan (Videotron) dan Retribusi Penyewaan bangunan (Radio). Sampai bulan Desember Tahun 2025 target pendapatan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 900.000,- dengan persentase 3,42%.

Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kominfo Tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, disebabkan karena Retribusi Penyewaan Bangunan (Radio) tidak dapat dipungut karena tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Belanja

Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah sebesar Rp. 9,713,882,308 ,- yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja tersebut digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

VISI dan MISI Dinas Komunikasi dan Informatika:

Visi	Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera
Misi	Misi 1 : Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani

Sumber: Renstra 2025-2029

BAB IV PENUTUP

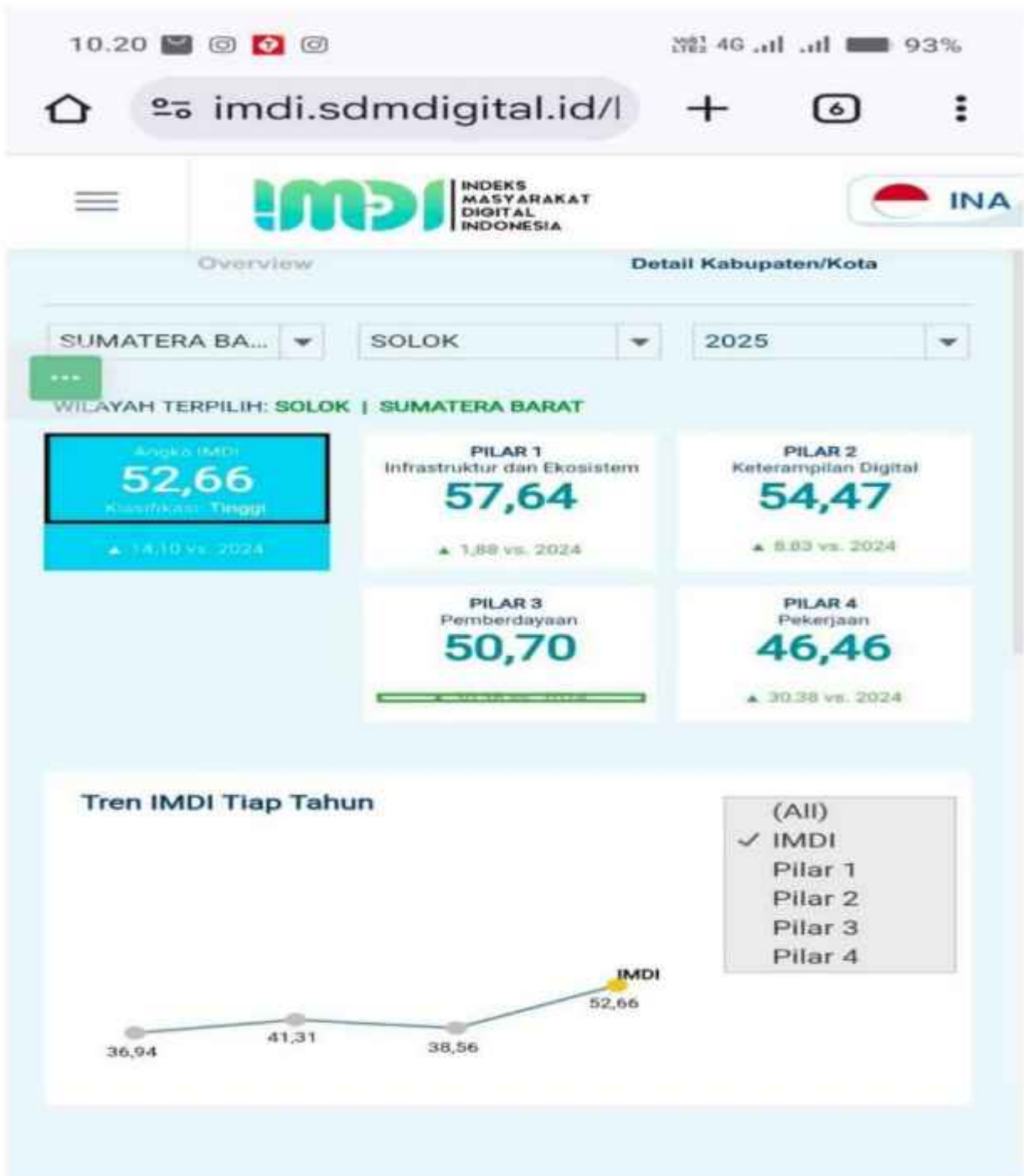
Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan tahun pertama untuk renstra Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama, partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dari renstra 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Diskominfo Kabupaten Solok tahun 2025 dapat disimpulkan terdapat 5 (Lima) indikator kinerja utama pada Renstra baru (2025-2029). Dari 5 indikator tersebut, terdapat 1 Indikator yang belum memiliki target tahun 2025. Pada Renstra lama (2025-2029) terdapat 8 (Delapan) indikator kinerja utama. Dari 8 (Delapan) Indikator tersebut terdapat 2 (Dua) indikator yang belum memenuhi target.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memenuhi sarana dan prasarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas secara bertahap yang dapat mendukung kinerja Dinas Kominfo.
2. Menitikberatkan rencana aksi dalam penerapan tolak ukur indikator kinerja.
3. Mensinergikan setiap aplikasi melalui Integrasi dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas.
4. Mengedukasi seluruh OPD/SKPD dan *stakeholder* terkait dalam mendukung Indikator Kinerja Umum (IKU) Dinas Kominfo Kabupaten Solok.
5. Dalam penyusunan anggaran, perlu memprioritaskan unsur kebutuhan, bukan unsur keinginan.

LAMPIRAN



Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital © 2026 – BPSDM Komdigi



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-467/01000/ES/2024

Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Solok

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Pemerintah Kabupaten Solok**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Solok**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Solok** tahun 2024 adalah **2,08** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Solok**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Solok**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Pit. Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.



LAPORAN HASIL PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

PEMERINTAH KAB. SOLOK



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdigi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025



PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



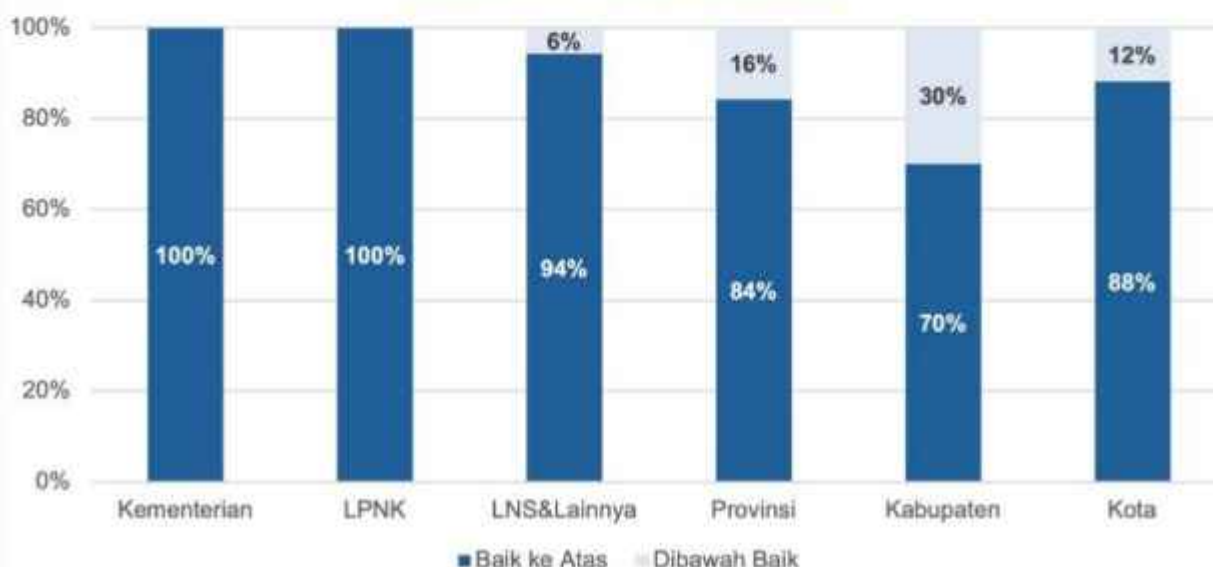
PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

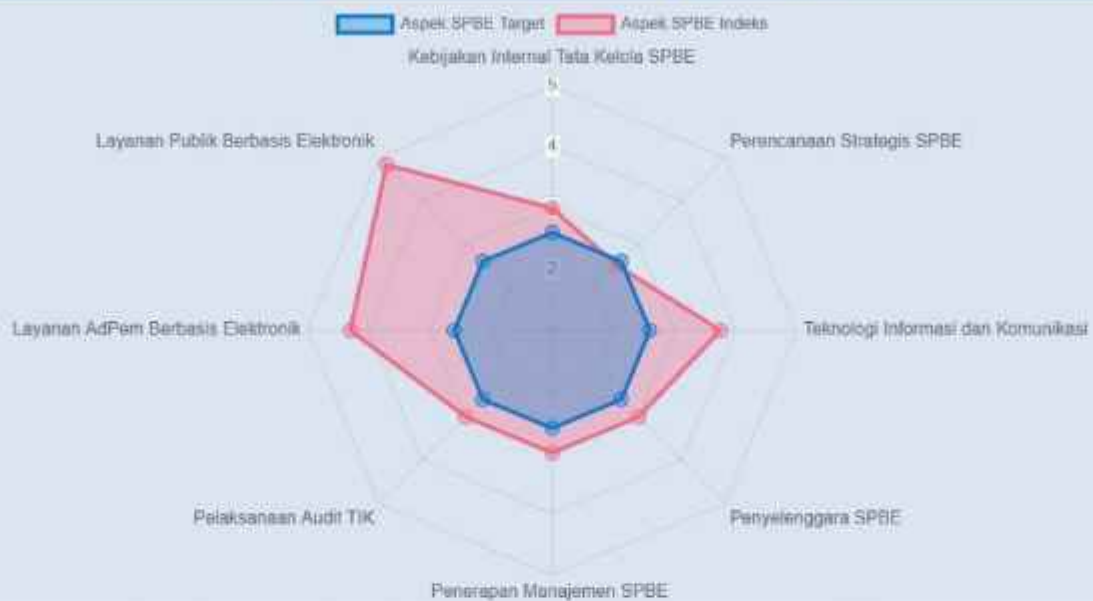
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2025



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	3,71
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,00</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>2,50</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>3,75</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>3,00</i>
Domain Manajemen SPBE	3,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>3,00</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>3,00</i>
Domain Layanan SPBE	4,51
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>4,30</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,83</i>

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



RAHASIA



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 700.1.2/14/INSP-D/LHE/2025

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS BERKUALITAS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

📍 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang KM 20 Arosuka
Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat

✉ [Email : inspektoratdaerahkab.solok@gmail.com](mailto:inspektoratdaerahkab.solok@gmail.com)

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

Jumlah	74,40
Predikat	BB

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;	6,00	BB	4,80
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);	9,00	B	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	15,00	B	10,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan;	6,00	BB	4,80
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;	9,00	BB	7,20
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50
3	Pelaporan Kinerja.	15,00	11,55	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;	3,00	BB	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;	4,50	B	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7,50	BB	6,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	25,00	18,75	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;	5,00	BB	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;	7,50	BB	6,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	12,50	B	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	BB	74,40

III. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja memiliki skor sebesar 21,60 dari bobot 30,00. hal ini disebabkan:

- 1) Belum ada bukti rapat pembahasan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
- 2) Pohon Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 3) Dokumen Renja belum dijadikan acuan dalam penyusunan DPA pada Perangkat Daerah.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki skor sebesar 22,50 dari bobot 30,00. hal ini disebabkan:

- 1) Belum ada bukti penerapan Reward atas Capaian kinerja yang baik dan punishment atas kegagalan dan/ atau tidak tercapainya kinerja

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memiliki skor sebesar 11,55 dari bobot 15,00. hal ini disebabkan:

- 1) Dokumen LAKIP belum menginfokan Target kinerja Tahun sebelumnya
- 2) Dalam menyusun Dokumen LAKIP untuk melibatkan jajaran pegawai sampai level Tingkat bawah

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI

PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Solok, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan survei menggunakan 500 orang sampel dari 297.182 orang penduduk Kabupaten Solok usia produktif (15-64 tahun) yang dihitung berdasarkan Metode Slovin Formula.
- Dari 500 orang sampel diperoleh 405 orang terpapar informasi pembangunan Kabupaten Solok.
- Jika merujuk pada jumlah penduduk Kabupaten Solok usia produktif (15-64 tahun) yaitu 297.182 orang, maka diperoleh 241.717 orang yang terpapar informasi pembangunan Kabupaten Solok, dimana capaiannya adalah sebesar 81 %.

Arosuka, 30 Desember 2025

Kepala,



SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH. MM

Pembina TK. IV.b

NIP.197203191993032004



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 03/KEP/KI-PSB/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mengetahui kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2025;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 3).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 05/BA/KI-PSB/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari 11 (Sebelas) Kategori

Badan Publik yang berpartisipasi dan telah melalui tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;

- KETIGA : Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan tidak dapat diganggu gugat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 18 November 2025

KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT,

MUSFI YENDRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 03 /KEP/KI-PSB/XII/2025
 TANGGAL : 18 November 2025
 TENTANG : PENETAPAN HASIL MONITORING
 DAN EVALUASI KETERBUKAAN
 INFORMASI PUBLIK PADA
 BADAN PUBLIK TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025**

1. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Rumah Sakit Jiwa HB. Saanin Padang	99.15	Informatif
2.	Sekretariat DPRD	98.94	Informatif
3.	RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H	98.92	Informatif
4.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	93.93	Informatif
5.	Dinas Kesehatan	93.92	Informatif
6.	RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	93.83	Informatif
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93.67	Informatif
8.	Dinas Kebudayaan	93.34	Informatif
9.	Inspektorat	92.37	Informatif
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.34	Informatif
11.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	92.31	Informatif
12.	Dinas Kehutanan	91.77	Informatif
13.	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan	91.73	Informatif
14.	Dinas Lingkungan Hidup	91.52	Informatif
15.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	91.25	Informatif
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi	87.64	Menuju Informatif
17.	Biro Pembangunan	84.46	Menuju Informatif
18.	Biro Hukum	66.22	Cukup Informatif
19.	Biro Umum	65.08	Cukup Informatif
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	63.92	Cukup Informatif
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	62.78	Cukup Informatif
22.	Dinas Sosial	60.48	Cukup Informatif
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.34	Kurang Informatif
24.	Dinas Pendidikan	58.2	Kurang Informatif
25.	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	58.19	Kurang Informatif
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan	57.05	Kurang Informatif
27.	Biro Perekonomian	57.05	Kurang Informatif

28.	Dinas Pariwisata	55.9	Kurang Informatif
29.	Dinas Perhubungan	55.89	Kurang Informatif
30.	Biro Bina Kesejahteraan Rakyat	54.75	Kurang Informatif
31.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51.31	Kurang Informatif
32.	Badan Pendapatan Daerah	50.16	Kurang Informatif
33.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	49.02	Kurang Informatif
34.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.87	Kurang Informatif
35.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	46.72	Kurang Informatif
36.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45.57	Kurang Informatif
37.	Badan Kepegawaian Daerah	45.57	Kurang Informatif
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.13	Kurang Informatif
39.	Biro Organisasi	39.84	Tidak Informatif
40.	Dinas Pangan	38.69	Tidak Informatif
41.	Biro Administrasi Pimpinan	37.54	Tidak Informatif
42.	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.4	Tidak Informatif
43.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	31.81	Tidak Informatif
44.	Satuan Polisi Pamong Praja	31.81	Tidak Informatif
45.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAPPKB	27.22	Tidak Informatif
46.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	27.22	Tidak Informatif
47.	Badan Penghubung	24.92	Tidak Informatif
48.	RS. Paru Sumbar	23.78	Tidak Informatif
49.	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	22.63	Tidak Informatif
50.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.59	Tidak Informatif
51.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	13.44	Tidak Informatif
52.	RSUD M. Natsir Solok	11.15	Tidak Informatif

2. KATEGORI INSTANSI VERTIKAL PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	99.3	Informatif
2.	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat	98.83	Informatif
3.	Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	97.06	Informatif
4.	Pengadilan Tinggi Padang	92.03	Informatif
5.	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat	91.72	Informatif
6.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X	91.63	Informatif
7.	Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	90	Informatif
8.	Pengadilan Tinggi Agama Padang	85.17	Menuju Informatif
9.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat	83.84	Menuju Informatif
10.	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	66	Cukup Informatif
11.	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	61.8	Cukup Informatif

12.	Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat	50.6	Kurang Informatif
13.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat	37.3	Tidak Informatif
14.	Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat	28.9	Tidak Informatif
15.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	22.6	Tidak Informatif
16.	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	22.6	Tidak Informatif
17.	Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat	21.9	Tidak Informatif
18.	BKSDA Provinsi Sumatera Barat	17.7	Tidak Informatif

3. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Kota Padang	98.35	Informatif
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	98	Informatif
3.	Kabupaten Solok Selatan	97.81	Informatif
4.	Kabupaten Tanah Datar	93.02	Informatif
5.	Kota Padang Panjang	92.09	Informatif
6.	Kabupaten Dharmasraya	91.45	Informatif
7.	Kota Bukittinggi	91.23	Informatif
8.	Kabupaten Lima Puluh Kota	87.74	Menuju Informatif
9.	Kabupaten Agam	84.8	Menuju Informatif
10.	Kota Solok	82.71	Menuju Informatif
11.	Kota Payakumbuh	66	Cukup Informatif
12.	Kabupaten Padang Pariaman	66	Cukup Informatif
13.	Kota Pariaman	63.2	Cukup Informatif
14.	Kota Sawahlunto	47.1	Kurang Informatif
15.	Kabupaten Sijunjung	42.9	Kurang Informatif
16.	Kabupaten Solok	39.4	Tidak Informatif
17.	Kabupaten Pasaman Barat	21.9	Tidak Informatif
18.	Kabupaten Pasaman	16.3	Tidak Informatif
19.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13.5	Tidak Informatif

4. KATEGORI PEMERINTAH NAGARI / DESA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Nagari Air Haji Barat	97.89	Informatif
2.	Nagari Muara Inderapura	97.29	Informatif
3.	Nagari Koto Besar	95.32	Informatif
4.	Nagari Koto Tuo	90	Informatif
5.	Nagari Sungai Rumbai	84.76	Menuju Informatif
6.	Nagari Tabek Patah	68.8	Cukup Informatif
7.	Nagari Cubadak	66.7	Cukup Informatif
8.	Nagari Sungai Duo	63.2	Cukup Informatif
9.	Nagari Sungai Aua	42.2	Kurang Informatif
10.	Nagari Gunung Rajo	40.8	Kurang Informatif

11.	Nagari Kapa	40.1	Kurang Informatif
12.	Nagari Ranah Koto Tinggi	36.6	Tidak Informatif
13.	Nagari Ujung Gading	29.6	Tidak Informatif
14.	Nagari Tambang	27.5	Tidak Informatif
15.	Nagari Tanjung Beringin	25.4	Tidak Informatif
16.	Desa Sikapak Timur	25.4	Tidak Informatif
17.	Desa Santua	24.7	Tidak Informatif
18.	Desa Talawi Hilie	23.3	Tidak Informatif
19.	Nagari Pujorahayu	22.6	Tidak Informatif
20.	Nagari Kubang	21.2	Tidak Informatif
21.	Nagari Aia Manggih Selatan	21.2	Tidak Informatif
22.	Nagari Sako Selatan Pasir Talang	21.2	Tidak Informatif
23.	Nagari Kapuh Utara	19.1	Tidak Informatif
24.	Desa Bungo Tanjung	19.1	Tidak Informatif
25.	Desa Sipora Jaya	18.4	Tidak Informatif
26.	Nagari/ Desa Jambak Kec. Lubuk Sikaping	18.4	Tidak Informatif
27.	Nagari Sariak Laweh	17.2	Tidak Informatif
28.	Nagari Indudur	16.3	Tidak Informatif
29.	Nagari Baringin	14.9	Tidak Informatif
30.	Nagari Sundata Utara	12.8	Tidak Informatif
31.	Nagari Andiang	12.1	Tidak Informatif
32.	Nagari Alam Pauh Duo	12.1	Tidak Informatif
33.	Nagari Lubuk Jantan	12.1	Tidak Informatif
34.	Nagari Lareh Nan Panjang	12.1	Tidak Informatif
35.	Nagari Padang Air Dingin	12.1	Tidak Informatif
36.	Nagari Koto Gadang Koto Anau	12.1	Tidak Informatif
37.	Nagari Singkarak	12.1	Tidak Informatif
38.	Desa Matobe	10.7	Tidak Informatif
39.	Desa Sikalang	10.7	Tidak Informatif
40.	Desa Kubang Tengah	10.7	Tidak Informatif
41.	Nagari Lubuk Gadang Timur	10	Tidak Informatif
42.	Nagari Pulau Punjung	10	Tidak Informatif
43.	Desa Saureinuk	10	Tidak Informatif
44.	Desa Tuapejat	10	Tidak Informatif
45.	Nagari Limo Koto	10	Tidak Informatif
46.	Desa Silungkang Oso	10	Tidak Informatif
47.	Nagari Situjuah Gadang	10	Tidak Informatif

5. KATEGORI PERGURUAN TINGGI

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	91.47	Informatif
2.	Universitas Perintis Indonesia	88.44	Menuju Informatif
3.	Politeknik Negeri Padang	82.24	Menuju Informatif

4.	Institut Teknologi Padang	72.77	Cukup Informatif
5.	Universitas Dharma Andalas	61.15	Cukup Informatif
6.	Universitas PGRI Sumatera Barat	43.6	Kurang Informatif
7.	Universitas Mercubaktijaya	27.5	Tidak Informatif
8.	Politeknik Pelayaran Provinsi Sumatera Barat	25.4	Tidak Informatif
9.	Universitas Adzkia	20.5	Tidak Informatif
10.	Stikes Dharma Landbouw	20.5	Tidak Informatif
11.	Universitas Putra Indonesia Indonesia YPTK Padang	19.8	Tidak Informatif
12.	Universitas Fort De Kock Bukittinggi	19.8	Tidak Informatif
13.	Stikes Piala Sakti Pariaman	15.6	Tidak Informatif
14.	Universitas Bung Hatta	13.5	Tidak Informatif
15.	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang	13.5	Tidak Informatif
16.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	12.1	Tidak Informatif
17.	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin	12.1	Tidak Informatif
18.	Universitas Baiturahmah	12.1	Tidak Informatif
19.	Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi	12.1	Tidak Informatif
20.	Universitas Prima Nusantara Bukittinggi	11.4	Tidak Informatif
21.	Universitas Eka Sakti	10	Tidak Informatif
22.	Universitas Sumatera Barat	10	Tidak Informatif

6. KATEGORI SEKOLAH PENDIDIKAN MENENGAH (SMAN/SMKN/MAN)

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	SMAN 1 Kecamatan Guguk	96.52	Informatif
2.	SMKN 1 Payakumbuh	94.65	Informatif
3.	SMAN 2 Payakumbuh	93.35	Informatif
4.	MAN 1 Bukittinggi	85.05	Menuju Informatif
5.	SMAN 2 Solok	83.67	Menuju Informatif
6.	SMAN 4 Pariaman	79.6	Cukup Informatif
7.	SMAN 3 Painan	67.4	Cukup Informatif
8.	SMKN 1 Bonjol	63.9	Cukup Informatif
9.	SMKN 2 Sawahlunto	60.4	Cukup Informatif
10.	SMKN 2 Bukittinggi	60.4	Cukup Informatif
11.	SMAN 3 Payakumbuh	57.6	Kurang Informatif
12.	SMAN 2 Sawahlunto	56.2	Kurang Informatif
13.	SMAN 1 Gunung Talang	53.4	Kurang Informatif
14.	SMKN 1 Bukittinggi	52	Kurang Informatif
15.	SMKN 1 Batu Sangkar	50.6	Kurang Informatif
16.	SMK 2 Pariaman	49.9	Kurang Informatif
17.	SMAN 1 Padang Panjang	49.9	Kurang Informatif
18.	SMKN 2 Padang	48.5	Kurang Informatif
19.	SMKN 2 Lubuk Basung	45.7	Kurang Informatif
20.	SMKN 2 Batu Sangkar	45.7	Kurang Informatif

21.	SMKN 1 Padang Panjang	41.5	Kurang Informatif
22.	MA 1 Padang Pariaman	41.5	Kurang Informatif
23.	SMKN 1 Sijunjung	40.1	Kurang Informatif
24.	SMAN Tanjung Mutiara	39.4	Tidak Informatif
25.	SMAN 1 Sei Tarab	39.4	Tidak Informatif
26.	SMKN 1 Lubuk Basung	38	Tidak Informatif
27.	SMAN 2 Bukittinggi	36.6	Tidak Informatif
28.	SMAN 2 Lubuk Basung	35.9	Tidak Informatif
29.	SMAN 1 Batang Anai	34.5	Tidak Informatif
30.	SMAN 2 Painan	33.7	Tidak Informatif
31.	SMA 2 Padang Panjang	31.7	Tidak Informatif
32.	SMAN 1 Sitiung	31.7	Tidak Informatif
33.	SMAN 5 Padang	31.7	Tidak Informatif
34.	SMAN 1 Lubuk Basung	30.3	Tidak Informatif
35.	SMKN 1 Gunung Talang	28.2	Tidak Informatif
36.	SMAN 2 Lubuk Alung	27.5	Tidak Informatif
37.	SMAN 1 Luhak Nan Duo	25.4	Tidak Informatif
38.	SMAN 1 Sijunjung	25.4	Tidak Informatif
39.	SMKN 1 Solok Selatan	25.4	Tidak Informatif
40.	SMAN 7 Sijunjung	25.4	Tidak Informatif
41.	MAN 3 Padang	25.4	Tidak Informatif
42.	SMKN 2 Padang Panjang	24	Tidak Informatif
43.	SMKN 1 Sintuk Toboh Gadang	24	Tidak Informatif
44.	SMKN 1 Lembah Gumanti	22.6	Tidak Informatif
45.	SMAN 1 Pariaman	22.6	Tidak Informatif
46.	MA 2 Tanah Datar	21.9	Tidak Informatif
47.	SMAN 1 Kinali	21.9	Tidak Informatif
48.	SMAN 1 Solok Selatan	20.5	Tidak Informatif
49.	SMAN 3 Padang	20.5	Tidak Informatif
50.	SMAN 1 Pariangan	19.8	Tidak Informatif
51.	SMAN 1 Harau	19.7	Tidak Informatif
52.	SMAN 1 Lubuk Alung	17.7	Tidak Informatif
53.	SMKN 5 Solok Selatan	17.7	Tidak Informatif
54.	SMAN 1 Pulau Punjung	17.7	Tidak Informatif
55.	SMAN 3 Sawahlunto	17.7	Tidak Informatif
56.	SMAN 1 Solok	17.7	Tidak Informatif
57.	SMAN 1 Lareh Sago Halaban	16.3	Tidak Informatif
58.	SMAN 6 Padang	14.2	Tidak Informatif
59.	MAN 2 Padang Panjang	14.2	Tidak Informatif
60.	MAN 3 Payakumbuh	14.2	Tidak Informatif
61.	SMAN 2 Gunung Talang	13.5	Tidak Informatif
62.	SMAN 1 Bonjol	12.1	Tidak Informatif
63.	SMKN 1 Enam Lingsung	12.1	Tidak Informatif

64.	SMKN 1 Pariaman	12.1	Tidak Informatif
65.	SMAN Unggul Dharmasraya	12.1	Tidak Informatif
66.	SMAN 7 Padang	12.1	Tidak Informatif
67.	SMAN 1 Lubuk Sikaping	12.1	Tidak Informatif
68.	SMKN 1 Sasak Ranah Pasisie	12.1	Tidak Informatif
69.	SMKN 1 Koto Baru	12.1	Tidak Informatif
70.	MAN 1 Pasaman Barat	12.1	Tidak Informatif
71.	SMAN 2 Pariaman	12.1	Tidak Informatif
72.	SMKN 2 Solok	11.4	Tidak Informatif
73.	SMAN 2 Lubuk Sikaping	11.4	Tidak Informatif
74.	SMAN 1 Sawahlunto	11.4	Tidak Informatif
75.	MAN 3 Agam	11.4	Tidak Informatif
76.	SMKN 2 Pulau Punjung	10	Tidak Informatif
77.	SMAN 2 Sumatera Barat	10	Tidak Informatif
78.	SMAN 1 Painan	10	Tidak Informatif
79.	SMKN 1 Tarusan	10	Tidak Informatif
80.	SMAN 9 Sijunjung	10	Tidak Informatif
81.	SMKN 5 Sijunjung	10	Tidak Informatif
82.	SMKN 2 Payakumbuh	10	Tidak Informatif
83.	SMKN PP Negeri Padang Mangatas	10	Tidak Informatif
84.	SMKN 1 Pasaman	10	Tidak Informatif
85.	MAN 1 Solok	10	Tidak Informatif
86.	SMAN 3 Solok Selatan	10	Tidak Informatif

7. KATEGORI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	KPU Kota Padang	98.82	Informatif
2.	KPU Kota Pariaman	98.59	Informatif
3.	KPU Kota Bukittinggi	98.53	Informatif
4.	KPU Kabupaten Padang Pariaman	93.69	Informatif
5.	KPU Kabupaten Pesisir Selatan	93.49	Informatif
6.	KPU Kabupaten Solok	93.34	Informatif
7.	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	93.25	Informatif
8.	KPU Kota Sawahlunto	93.24	Informatif
9.	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	93.18	Informatif
10.	KPU Kabupaten Tanah Datar	92.77	Informatif
11.	KPU Kota Padang Panjang	92.68	Informatif
12.	KPU Kota Payakumbuh	91.64	Informatif
13.	KPU Kabupaten Solok Selatan	90.57	Informatif
14.	KPU Kota Solok	90	Informatif
15.	KPU Kabupaten Agam	88.53	Menuju Informatif
16.	KPU Kabupaten Dharmasraya	88.39	Menuju Informatif
17.	KPU Kabupaten Pasaman Barat	86.91	Menuju Informatif

18.	KPU Kabupaten Pasaman	54.8	Kurang Informatif
19.	KPU Kabupaten Sijunjung	39.4	Tidak Informatif

8. KATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1	Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	99.06	Informatif
2	Bawaslu Kota Pariaman	98.87	Informatif
3	Bawaslu Kota Padang	98.58	Informatif
4	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai	93.96	Informatif
5	Bawaslu Kabupaten Solok	93.84	Informatif
6	Bawaslu Kota Padang Panjang	93.83	Informatif
7	Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	93.8	Informatif
8	Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	93.68	Informatif
9	Bawaslu Kota Bukittinggi	93.65	Informatif
10	Bawaslu Kota Sawahlunto	93.59	Informatif
11	Bawaslu Kabupaten Agam	93.56	Informatif
12	Bawaslu Kota Payakumbuh	93.56	Informatif
13	Bawaslu Kota Solok	93.47	Informatif
14	Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	93.34	Informatif
15	Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	93.33	Informatif
16	Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota	93.3	Informatif
17	Bawaslu Kabupaten Pasaman	93.25	Informatif
18	Bawaslu Kabupaten Tanah Datar	93.2	Informatif
19	Bawaslu Kabupaten Sijunjung	91.29	Informatif

9. KATEGORI BUMD / BUMNAG - BUMDES

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	PT. Jamkrida Sumbar	91.98	Informatif
2.	Perumda Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok	86.1	Menuju Informatif
3.	Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar	72.67	Cukup Informatif
4.	Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh	58.16	Kurang Informatif
5.	PDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung	56.7	Kurang Informatif
6.	PDAM Kota Padang Panjang	27.5	Tidak Informatif
7.	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	24	Tidak Informatif
8.	PT. Balairung Citrajaya Sumbar	15.6	Tidak Informatif

9.	PDAM Kabupaten Pasaman	14.2	Tidak Informatif
10.	PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi	13.5	Tidak Informatif
11.	BUMDESA Saiyo Lumindai	11.4	Tidak Informatif
12.	BUMNAG Rangkiang Ameh Panginggahan	11.4	Tidak Informatif
13.	BUMNAG Bungo Satangkai Sungai Tarab	10	Tidak Informatif
14.	BUMNAG Timur Sejati Pakan Rabaa Timur	10	Tidak Informatif
15.	BUMNAG Binuang Sakato	10	Tidak Informatif
16.	Perumda Air Minum Kota Padang	10	Tidak Informatif
17.	PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat	10	Tidak Informatif

10. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	Pengadilan Agama Batusangkar	98.8	Informatif
2.	Pengadilan Agama Bukittinggi	98.76	Informatif
3.	Pengadilan Agama Payakumbuh	98.4	Informatif
4.	Pengadilan Agama Tanjung Pati	93.71	Informatif
5.	Pengadilan Negeri Sawahlunto	93.47	Informatif
6.	Pengadilan Agama Padang	92.4	Informatif
7.	Pengadilan Agama Muara Labuh	92.35	Informatif
8.	Pengadilan Agama Sijunjung	92.11	Informatif
9.	Pengadilan Agama Maninjau	91.51	Informatif
10.	Pengadilan Agama Padang Panjang	90.37	Informatif
11.	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	90.03	Informatif
12.	Pengadilan Agama Solok	90	Informatif
13.	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	86.88	Menuju Informatif
14.	Pengadilan Negeri Muaro	86.09	Menuju Informatif
15.	Pengadilan Agama Lubuk Basung	85.19	Menuju Informatif
16.	Pengadilan Agama Talu	85.18	Menuju Informatif
17.	Pengadilan Agama Sawahlunto	83.63	Menuju Informatif
18.	Pengadilan Agama Koto Baru	69.4	Cukup Informatif
19.	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	68.34	Cukup Informatif
20.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	66.21	Cukup Informatif
21.	Pengadilan Negeri Padang Panjang	58.79	Kurang Informatif
22.	Pengadilan Negeri Padang	56.68	Kurang Informatif
23.	Pengadilan Negeri Batusangkar	56.67	Kurang Informatif

24.	Pengadilan Negeri Solok	55.62	Kurang Informatif
25.	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	54.55	Kurang Informatif
26.	Pengadilan Negeri Pariaman	51.37	Kurang Informatif
27.	Pengadilan Agama Pariaman	50.31	Kurang Informatif
28.	Pengadilan Negeri Bukittinggi	50.31	Kurang Informatif
29.	Pengadilan Agama Painan	48.19	Kurang Informatif
30.	Pengadilan Agama Pulau Punjung	38.64	Tidak Informatif
31.	Pengadilan Negeri Koto Baru	28.03	Tidak Informatif
32.	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	25.91	Tidak Informatif
33.	Pengadilan Negeri Painan	23.8	Tidak Informatif
34.	Pengadilan Negeri Payakumbuh	12.12	Tidak Informatif

11. KATEGORI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN / KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PREDIKAT
1.	BPS Kabupaten Pasaman Barat	98.42	Informatif
2.	BPS Kabupaten Solok Selatan	98.34	Informatif
3.	BPS Kota Pariaman	98.08	Informatif
4.	BPS Kabupaten Pasaman	93.92	Informatif
5.	BPS Kota Payakumbuh	93.92	Informatif
6.	BPS Kota Bukittinggi	93.8	Informatif
7.	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	93.77	Informatif
8.	BPS Kabupaten Sijunjung	93.76	Informatif
9.	BPS Kabupaten Padang Pariaman	93.74	Informatif
10.	BPS Kota Solok	93.71	Informatif
11.	BPS Kabupaten Pesisir Selatan	93.65	Informatif
12.	BPS Kabupaten Tanah Datar	93.64	Informatif
13.	BPS Kota Padang	93.64	Informatif
14.	BPS Kota Sawahlunto	93.16	Informatif
15.	BPS Kota Padang Panjang	92.33	Informatif
16.	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	91.7	Informatif
17.	BPS Kabupaten Dharmasraya	91.54	Informatif
18.	BPS Kabupaten Agam	91.54	Informatif
19.	BPS Kabupaten Solok	59.7	Kurang Informatif



 KETUA KOMISI INFORMASI
 PROVINSI SUMATERA BARAT,
 MUSFI YENDRA



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jl. Raya Solok - Padang Km. 20, Arosuka

Kode Pos 27396 Telp (0755) 31333 - 31334

Laman: setda.solokkab.go.id Pos-el: info@solokkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Urusan	: Komunikasi dan Informatika
No IKK	: 2.1.2
IKK	: Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Definisi Operasional Pembilang	: Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Definisi Operasional Penyebut	: Jumlah Layanan Publik
Nilai Pembilang	: 70
Nilai Penyebut	: 82
Capaian	: 85
Satuan Hasil	: %
Kategori/ Kendala	: <input type="checkbox"/> ANGGARAN <input type="checkbox"/> SUMBER DAYA MANUSIA <input type="checkbox"/> KEBUAKAN <input type="checkbox"/> LAINNYA
Permasalahan	:
Sumber Data	: 1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. 3.

Arosuka, 26 Februari 2026
KEPALA,

SUSI SOFIANTYANDANI, SH, MM
NIP. 197208191983032004



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jl. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : diskominfo.solokkab.go.id, Email : diskominfo@solokkab.go.id

JUMLAH LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

NO	Perangkat Daerah	Layanan Publik secara Online dan Terintegrasi	Sub Layanan Publik	Ket
1	Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. JDIH2. Simonbang3. Info harga pasar	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat bagi pemerintah maupun masyarakat.2. Menginformasikan realisasi anggaran Pemerintahan Kab solok3. Menginformasikan Harga Kebutuhan Pokok	
2	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Pengaduan dan Aspirasi Publik2. Layanan Ketatausahaan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan	
3	Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Pengaduan dan Aspirasi Publik2. Lapor upg3. WBS	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian gratifikasi2. Pengaduan Tindak Pidana Korupsi	
4	Badan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Keuangan2. Layanan BMD	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Aset /BMD2. Pengelolaan Anggaran3. SIPD RI4. Pengelolaan pendapatan	
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Kepegawaian2. Layanan Kinerja3. Layanan Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Simpeg2. Pengelolaan Taspen3. Pengelolaan pensiun4. Pengelolaan kepangkatan	
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Perencanaan2. Layanan Inovasi Daerah3. Layanan Monev Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah4. Layanan Data Perencanaan (SIDASI)	<ol style="list-style-type: none">1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;2. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan3. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;	

7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Dan Data Kebencanaan 2. Layanan Peringatan Dini Bencana. 3. Pelayanan Kegawatdaruratan 4. Santunan Dan Bantuan Korban Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi dan data kebencanaan 2. Pelayanan peringatan dini bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4. Pelayanan penanganan darurat
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Informasi Publik. 2. Layanan Pengaduan. 3. Layanan Klinik Organisasi Masyarakat dan Partai Politik 4. Layanan Monitoring Pemilu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan informasi kesbangpol 2. Pengaduan melalui surat elektronik, media sosial, telepon, maupun melalui petugas front desk
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Komunikasi Publik 2. Layanan Aplikasi Informatika 3. Layanan Statistik Sektoral 4. Layanan Keamanan Informasi 5. Layanan Pengaduan dan Aspirasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Pengelolaan e-government 3. Penyelenggaraan Data Statistik 4. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 5. Layanan Aspirasi dan Pengaduan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Nagari 2. Perencanaan Pembangunan Nagari 3. Layanan Keuangan Nagari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan nagari 2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa
11	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan kesehatan 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan rujukan tingkat Kabupaten 2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat Kabupaten. 3. Penerbitan izin praktek dan izin tenaga kesehatan. 4. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP
12	Dinas Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan SDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SDA

	Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 2. Layanan Bangunan gedung 3. Layanan penataan bangunan 4. Jalan 5. Jasa konstruksi 6. Layanan penataan ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan penataan bangunan dan Lingkungannya 3. Penyelenggaraan Jalan 4. Penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi (non kecil dan kecil) 5. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pariwisata dan Kebudayaan 2. Info Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan destinasi pariwisata 2. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata
14	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan sarana dan prasarana 2. Perizinan usaha pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam KPenerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Kabupatenabupaten 3. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
15	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2. Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) 2. Pengelolaan Kehati 3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KK KITAP 2. KTP 3. Surat Keterangan
17	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Kurikulum 2. Layanan pendidik dan tenaga kependidikan 3. Layanan perizinan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kurikulum muatan lokal, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal 2. Pemindehan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam daerah 3. Penertiban izin pendidikan dasar 4. Penertiban izin pendididkan anak usia dini

18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1. Layanan perizinan	1. Izin usaha industri 2. Izin lokasi 3. Izin usaha jasa konstruksi
19	Dinas Perhubungan	1. Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten 2. Pengujian berkala kendaraan bermotor. 3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 4. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Pembinaan Perpustakaan 2. Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan perpustakaan tingkat 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Kabupaten 3. Pengelolaan arsip dinamis 4. Pemusnahan arsip
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Layanan Perlindungan Perempuan 2. Layanan Kualitas Keluarga 3. Layanan Sistem Data Gender dan Anak 4. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten. 2. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten. 3. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten
22	Dinas Perikanan dan Pangan	1. Layanan Ketahanan Pangan 2. Layanan Perikanan	1. pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. tawes sehat (uji kualitas air)
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1. Layanan UMKM	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten. 2. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan Perijinan 3. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
24	Dinas Sosial	1. Layanan Sosial 2. Layanan rehabilitas soaial	1. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial 2. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk

		3. Perlindungan dan Jaminan Sosial	3. bekas korban penyalahgunaan NAPZA 3. Pendataan dan Pengelolaan data fakir Miskin	
25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawanan Permukiman dan Pertanahan	1. Layanan perumahan dan permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. 2. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 4. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1. Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kebakaran 3. Bencana	1. Penanggulangan bencana. 2. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	

Arosuka, 29 Januari 2026

Kepala,



SUSI SOFIANTISA IDANI, SH, MM

Pembina TKI, IV.b

NIP.197203191993032004



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jl. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : diskominfo.solokkab.go.id, Email : diskominfo@solokkab.go.id

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025

TAHUN	Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		CAPAIAN (%)	KET
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD		
2025	41	41	100%	

Arosuka, 29 Januari 2026
Kepala,

SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
Pembina TK.I, IV.b
NIP.197203191993032004



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok - Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : diskominfo.solokkab.go.id, Email : diskominfo@solokkab.go.id

**JUMLAH PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025**

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Inspektorat Daerah	1
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1
6	Badan Keuangan Daerah	1
7	Badan Pendapatan Daerah	1
8	Badan Kesbangpol	1
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
10	Dinas Perhubungan	1
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1
12	Dinas Kesehatan	1
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1
16	Dinas Lingkungan Hidup	1
17	Dinas Sosial	1
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
20	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga	1
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
24	Dinas Pertanian	1
25	Dinas Perikanan dan Pangan	1
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan	1
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	1
28	Kecamatan Gunung Talang	1
29	Kecamatan Junjung Sirih	1
30	kecamatan X Koto Diatas	1
31	Kecamtan X Koto Singkarak	1
32	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	1
33	Kecamatan Kubung	1
34	Kecamatan Bukit Sundi	1
35	Kecamatan Payung Sekaki	1

36	Kecamatan Danau Kembar	1
37	Kecamatan Lembah Gumanti	1
38	Kecamatan Hiliran Gumanti	1
39	Kecamatan Tigo Lurah	1
40	Kecamatan Lembang Jaya	1
41	Kecamatan Pantai Cermin	1
Jumlah		41

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Arosuka, 29 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok



[Handwritten signature in blue ink]

SUSI SOFIANNI ANDANI, SH, MM

Perbina TI /1/ IV.b

NIP. 19720319 199303 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
 Jalan Raya Solok - Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
 Website : diskominfo.solokkab.go.id, Email : diskominfo@solokkab.go.id

**PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK
 DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SOLOK
 TAHUN 2025**

No	Perangkat Daerah	Jenis Data Statistik Sektoral	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Indeks reformasi birokrasi	
		Nilai akuntabilitas kinerja	
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	
2	Sekretariat DPRD	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	
		Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam dokumen anggaran Sekretariat Dewan DPRD	
3	Inspektorat Daerah	Level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah	Urusan Pengawasan
		Persentase tindak lanjut temuan	
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Indeks kualitas perencanaan Daerah	Urusan Perencanaan Pembangunan
		Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang disusun (%)	
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Indeks inovasi daerah	
5	Badan Keuangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan (%)	Urusan Keuangan
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	
		Persentase belanja pendidikan (minimal 20%)	
		Persentase belanja kesehatan (minimal 10%) diluar gaji (%)	
		Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	
6	Badan Pendapatan Daerah	Deviiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (%)	Urusan Keuangan
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	
7	Badan Kesbangpol	Deviiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (%)	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase partai politik dan organisasi masyarakat yang terfasilitasi (%)	
		Persentase penyelesaian konflik (%)	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Integrasi dan sinkronisasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten /kota berbasis teknologi	
		Persentase masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap jumlah keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	

		<p>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana + masyarakat yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana + masyarakat yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana</p> <p>Persentase korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</p>	
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<p>Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi (%)</p> <p>Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p> <p>Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah /dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p> <p>Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p> <p>Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat kompetensi teknis (%)</p> <p>Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)</p> <p>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)</p>	<p>Urusan Kepegawaian</p> <p>Urusan Pendidikan dan Pelatihan</p>
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	<p>Indeks Desa Membangun (IDM)</p> <p>Persentase Peningkatan Desa Mandiri</p> <p>Persentase pengentasan desa tertinggal</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah</p> <p>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan nagari dan lembaga adat nagari</p>	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11	Dinas Perhubungan	<p>Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas</p> <p>Persentase layanan transportasi air</p>	Urusan Perhubungan
12	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<p>Angka Rata-Rata Lama Sekolah</p> <p>Harapan Lama Sekolah</p> <p>Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Masyarakat</p> <p>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar</p> <p>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama</p> <p>Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan</p> <p>Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI / Paket A</p> <p>Angka Partisipasi Sekolah SMP / MTS / Paket B</p> <p>Persentase Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik</p> <p>Persentase Pendidik PAUD Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain atau Psikologi dan Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Indeks Survei Karakter</p> <p>Indeks Survei Lingkungan Belajar</p> <p>Persentase Sekolah yang Mengintegrasikan Muatan Lokal dalam Dokumen</p> <p>Persentase Sekolah dengan Kegiatan Literasi</p> <p>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</p> <p>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</p> <p>Pemeroleshan mendali dalam event olahraga nasional maupun internasional</p> <p>Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan</p>	<p>Urusan Pendidikan</p> <p>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</p>
13	Dinas Kesehatan	<p>Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)</p> <p>Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)</p> <p>Prevelensi Gizi Kurang Pada Anak Balita (%)</p> <p>Prevelensi Stunting pada Anak Balita (%)</p> <p>Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child (UCI)</p> <p>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan</p>	Urusan Kesehatan

		Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue Cakupan pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia yang Sesuai Standar Persentase Usaha Farmasi, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Makanan dan Cakupan Nagari Siaga (%) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk (Per 1000) Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Cakupan Pelayanan kesehatan Balita Sesuai Standar Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Orang Usia 15-29 Tahun mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase Orang Terduga tuberkulosis mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Persentase Rumah Tangga Bersantias Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber Hak Pengelolaan / Hak Guna Bangunan Rasio bangunan ber-Lzin Mendirikan Bangunan per Satuan Bangunan Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persentase Gedung dan Lingkungan Pemerintah Berkondisi Baik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemecintah daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Persentase penyelesaian kasus tanah negara Persentase ganti rugi dan santunan tanah yang diselesaikan Jumlah persil tanah yang di tata	Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Urusan Pertanahan
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan kerugian materil dan /atau pengobatan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Persentase jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di daerah dalam tingkat waktu tangkap (response time) oleh perangkat daerah pelaksana urusan /fungsi pemadam kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di daerah dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan perangkat daerah pelaksana urusan /fungsi pemadam kebakaran terhadap jumlah kejadian kebakaran di daerah Persentase gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Persentase perda dan perkada yang ditegakkan Persentase personil Satpol PP berkualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

17	Dinas Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%) Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten	Urusan Sosial
18	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase timbulan sampah yang ditangani Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dirwasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Urusan Lingkungan Hidup
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan investarisasi Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu Kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto Kunjungan wisata Lama kunjungan wisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten / Kota (%) Nilai tambah ekonomi kreatif	Urusan Kebudayaan Urusan Pariwisata
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio pasangan berakate nikah Penerapan kartu tanda penduduk (KTP) nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Cakupan penerbitan KTP Cakupan penerbitan dokumen kependudukan Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani Perekaman KTP Elektronik Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase perjanjian data kependudukan Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Urusan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil
21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Tingkat produktivitas tenaga kerja Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS	Urusan Tenaga Kerja

		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	
		Angka sangketa pengusaha-pekerja per-tahun	
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	
		Rasio Lulusan S1 /S2/S3	
		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota (%)	Urusan Pemerintahan
		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di	Bidang Penanaman Modal
		Jumlah investor berskala nasional	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri /	
		Kenaikan /penurunan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (Milyar	
		Rasio daya serap tenaga kerja	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Urusan Perizinan
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Urusan Statistik
		Tingkat keamanan informasi daerah (%)	Urusan Persandian
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase pengunjung perpustakaan pertahun (%)	Urusan Perpustakaan
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	Urusan Kearsipan
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (%)	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. (%)	
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	
24	Dinas Pertanian	PDRB sektor pertanian (Juta Rupiah)	Urusan Pertanian
		Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	
		Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	
		Produksi sektor pertanian	
		Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	
		Produksi sektor perkebunan	
		Produktivitas pertanian perhektar per tahun (%)	
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	
		Cakupan bina kelompok petani (%)	
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) (%)	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) (%)	
25	Dinas Perikanan dan Pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Urusan Pangan
		Persentase koefisien variasi harga pangan strategis ditingkat konsumen dan produsen	
		Penguantan cadangan pangan	
		Perencanaan daerah rawan pangan	
		Ketersediaan pangan utama (beras) perkapita	

		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
		Persentase daerah rentan rawan pangan	
		Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	
		(%)	Urusan Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	
		Cakupan bina kelompok nelayan (%)	
		Produksi perikanan kelompok nelayan	
		Produksi perikanan budidaya	
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Koperasi Aktif	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase usaha mikro dan kecil	
		Persentase Usaha Kecil Menengah (UKM) non Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif	
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	Urusan Perdagangan
		Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	
		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	
		Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	Urusan Perindustrian
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (UKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anggaran responsif gender pada belanja APBD	
		Indeks Pembangunan Gender	
		Rasio kekerasan dalam rumah tangga	
		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga	
		Cakupan ketersediaan data gender dan anak	
		Capaian kabupaten layak anak	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	
		Laju pertumbuhan penduduk	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Total (TFR)	
		Rasio Aseptor Keluarga Berencana (KB)	
		Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera di kecamatan	
28	Kecamatan Gunung Talang	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
29	Kecamatan Junjung Sirih	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
30	kecamatan X Koto Diatas	Indeks kepuasan masyarakat	

		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
31	Kecamatan X Koto Singkarak	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
32	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
33	Kecamatan Kubung	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
34	Kecamatan Bukit Sundi	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
35	Kecamatan Payung Sekaki	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
36	Kecamatan Danau Kembar	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
37	Kecamatan Lembah Gumanti	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
38	Kecamatan Hiliran Gumanti	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
39	Kecamatan Tigo Lurah	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
40	Kecamatan Lembung Jaya	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	

41	Kecamatan Pantai Cermin	Indeks kepuasan masyarakat	
		Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di nagari	
		Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
		Persentase nagari tertib administrasi dan keuangan	
Jumlah			

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Arosuka, 29 Januari 2026
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Solok



SUSI SOFIANTI SARIANI, SH, MM
 Pembina Tk. IV.b
 NIP. 19720319 199303 2 004

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

Identitas Instansi atau Perusahaan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok

Alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Solok, Jalan Raya Solok-Padang KM. 20
Arosuka

**Nomor Telpun
Email** diskominfo@solokkab.go.id

**Pengisi Lembar Evaluasi
Jabatan** Fitria Fenti, S.Si, M.CIO
Kepala Bidang Aptika dan Persandian

Tanggal Pengisian 12/01/2026

Deskripsi Ruang Lingkup
Sistem Elektronik : Aplikasi SIMPEG dan SERASI
PSE : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Mengetahui,
Kepala Dinas



SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
NIP. 19720319 199303 2 004

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0

Skor Kategori SE

15 Kategori SE

Rendah

Responden:
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Solok

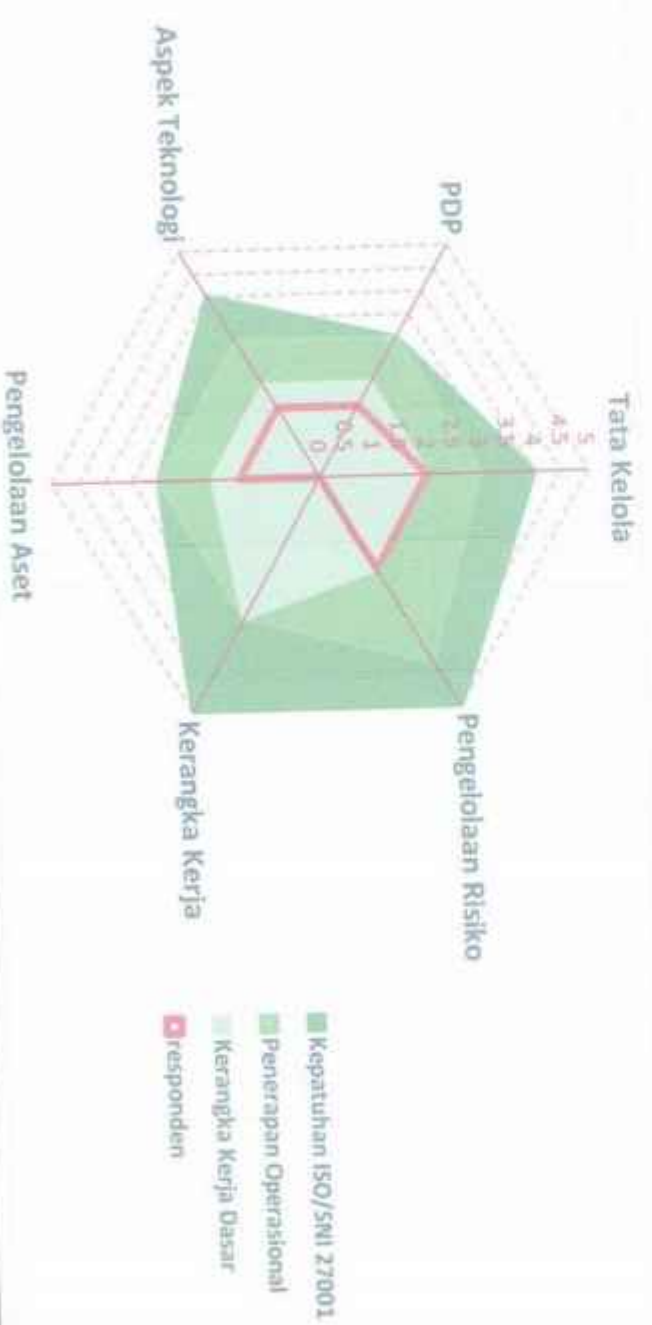
Hasil Evaluasi Akhir:

Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka
 0
 diskominfo@solokkab.go.id
 12/01/2026

Tata Kelola	: 78	T. Kematanganan:	II
Pengelolaan Risiko	: 35	T. Kematanganan:	II
Kerangka Kerja Keamanan Informasi	: 44	T. Kematanganan:	I
Pengelolaan Aset	: 89	T. Kematanganan:	I+
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 93	T. Kematanganan:	I+
Pelindungan Data Pribadi	: 28	T. Kematanganan:	I+
Pengamanan Keterlibatan P. Ketiga	: 0	%	





INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 700.1.2/14/INSP-D/LHE/2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**📍 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang KM 20 Arosuka
Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat**

✉ [Email : inspektoratdaerahkab.solok@gmail.com](mailto:inspektoratdaerahkab.solok@gmail.com)

Jumlah	74,40
Predikat	BB

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;	6,00	BB	4,80
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);	9,00	B	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	15,00	B	10,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan;	6,00	BB	4,80
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	9,00	BB	7,20
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50
3.	Pelaporan Kinerja.	15,00	11,55	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;	3,00	BB	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;	4,50	B	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7,50	BB	6,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	25,00	18,75	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.	5,00	BB	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;	7,50	BB	6,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	12,50	B	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	BB	74,40

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja memiliki skor sebesar 21,60 dari bobot 30,00. hal ini disebabkan:

- 1) Belum ada bukti rapat pembahasan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
- 2) Pohon Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 3) Dokumen Renja belum dijadikan acuan dalam penyusunan DPA pada Perangkat Daerah.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki skor sebesar 22,50 dari bobot 30,00. hal ini disebabkan:

- 1) Belum ada bukti penerapan Reward atas Capaian kinerja yang baik dan punisment atas kegagalan dan/ atau tidak tercapainya kinerja

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memiliki skor sebesar 11,55 dari bobot 15,00. hal ini disebabkan:

- 1) Dokumen LAKIP belum menginfokan Target kinerja Tahun sebelumnya
- 2) Dalam menyusun Dokumen LAKIP untuk melibatkan jajaran pegawai sampai level Tingkat bawah

**INDEKS KEPUASAN APARATUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2026**

NILAI KEPUASAN APARATUR

A

NAMA PELAYANAN : PELAYANAN SEKRETARIAT

RESPONDEN

Jumlah = 48 Orang
Jenis Kelamin : L = 34 Orang / P = 14 Orang

Periode Survei : 31 Desember 2025 s/d 03 Januari 2026

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT
KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI APARATUR DISKOMINFO**

Arosuka, Januari 2026
KEPALA DISKOMINFO

SUSI SOFIANI WIDANI, SH, MM
NIP. 197905172005011008

- Keterangan :
- U1 s.d U10 = Unsur-Unsur Pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - BCM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - % = Jumlah NRR BCM terdistribusi
 - NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuadrat yang terisi
 - NRR terdistribusi = NRR per unsur x 0,125 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 3,25 - 4,00
- B (Baik) : 2,51 - 3,25
- C (Kurang Baik) : 1,76 - 2,50
- D (Tidak Baik) : 1,00 - 1,75

No.	UNSUR PELAYANAN	Nilai RATA-RATA
U1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3,58
U2	Penyediaan Barang Cetak	3,28
U3	Sarana dan Prasarana	3,48
U4	Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	3,31
U5	Akses Internet	3,38
U6	Pengurusan Administrasi Kepegawaian	3,34
U7	Pengurusan Surat Menyurat	3,31
U8	Pelayanan Keuangan	3,41
U9	Pemberitahuan Informasi	3,34
U10	Fasilitas Ruang Rapat	3,28